

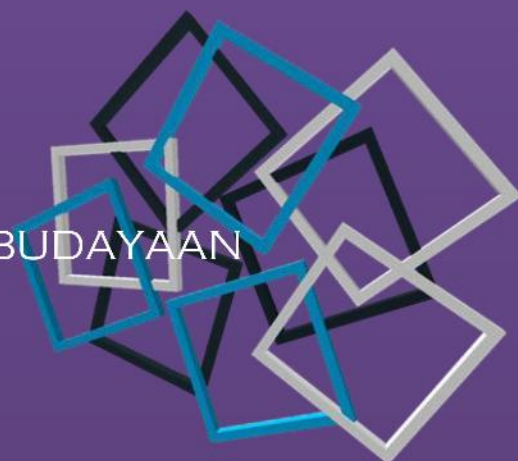


# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BADAN PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN BAHASA

2018

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2018 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Badan Bahasa tahun 2018. Badan Bahasa pada tahun 2018 menetapkan enam Sasaran Strategis (SS) dan sembilan Indikator Kinerja Program (IKP). Secara umum Badan Bahasa telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Permasalahan tersebut diantaranya (1) penetapan output 2019 agar sesuai dengan perubahan Renstra; (2) beberapa indikator yang belum mencapai 100%; (3) distribusi target belum terencana dengan baik.

Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan. Melalui laporan kinerja ini diharapkan

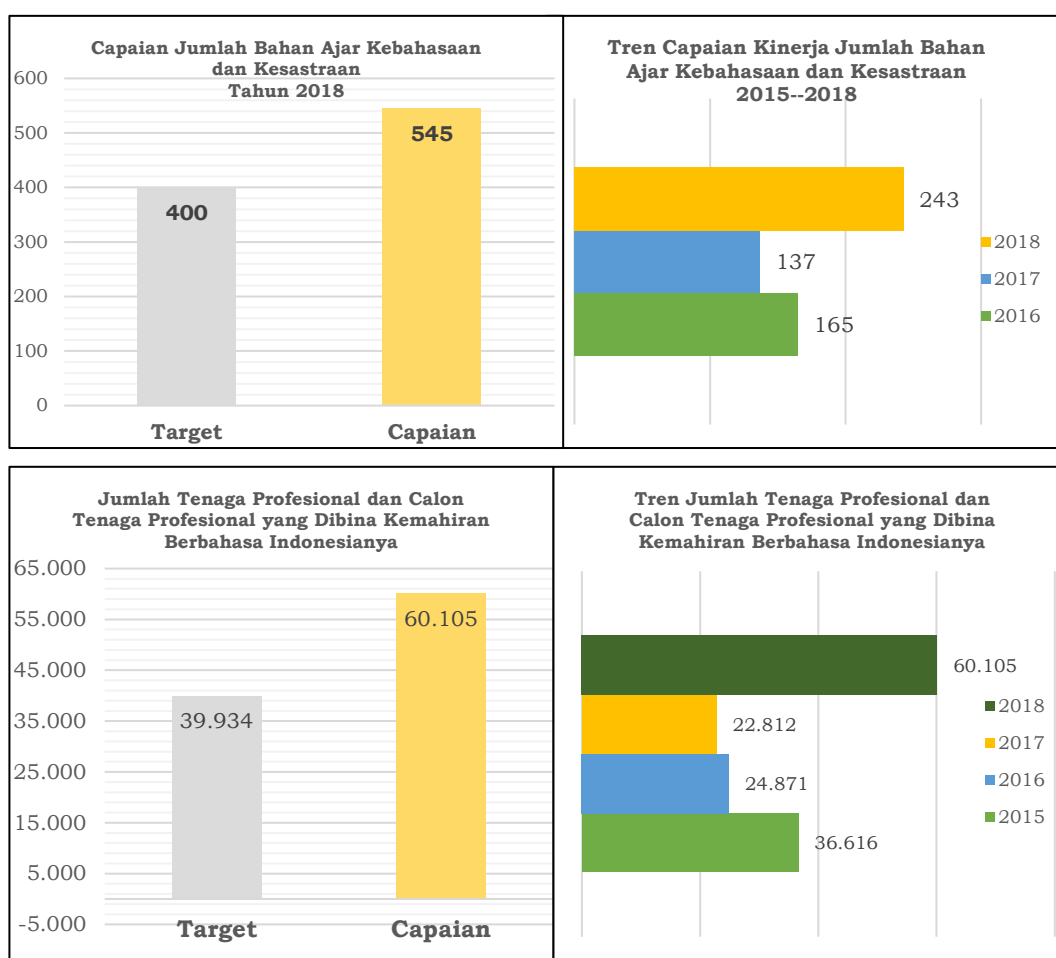
dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Badan Bahasa pada tahun 2018. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Badan Bahasa pada tahun 2018.

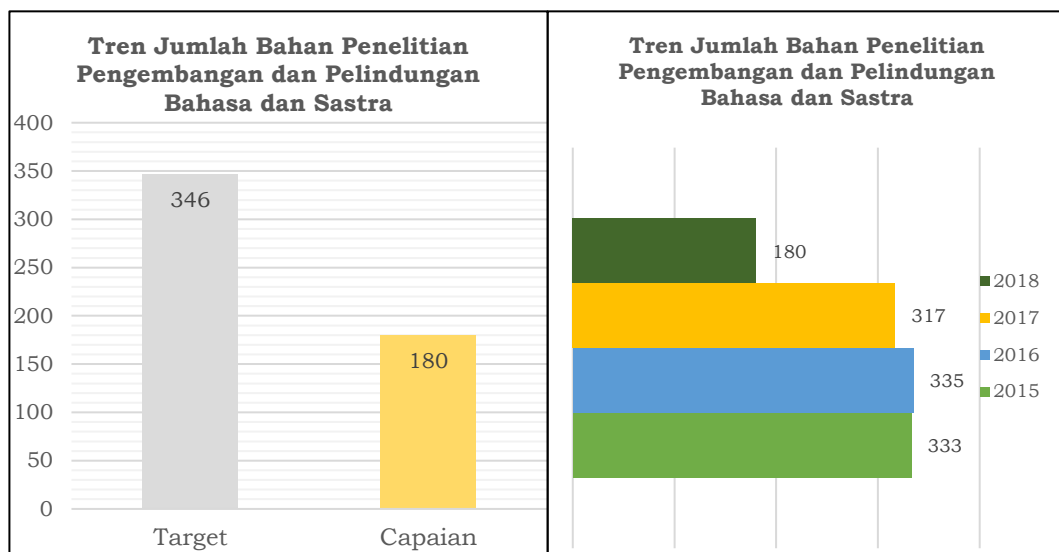
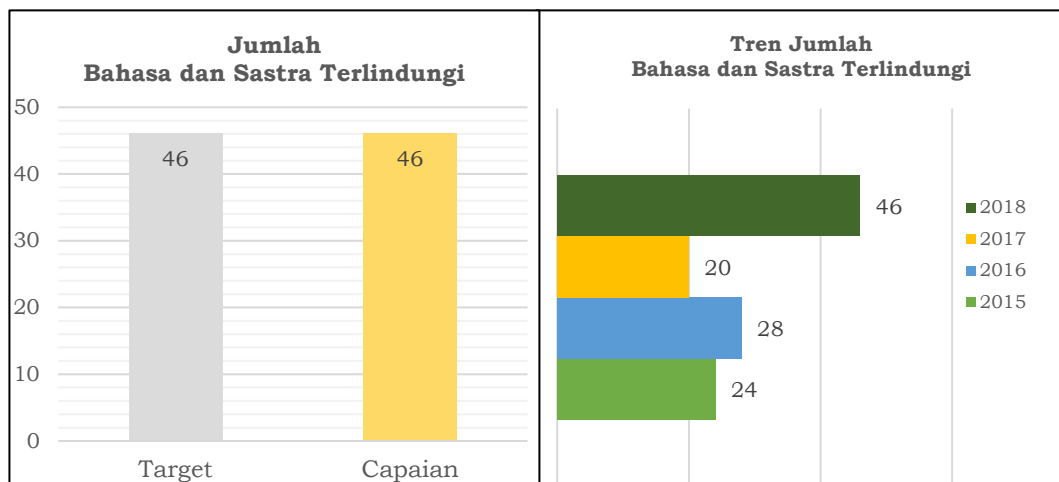
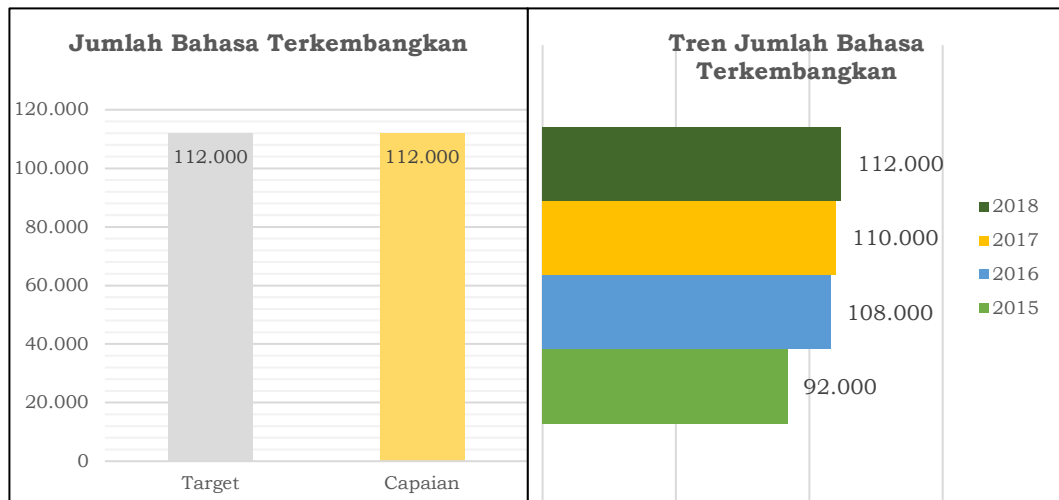
Jakarta,      Februari 2019  
Kepala Badan Pengembangan  
dan Pembinaan Bahasa,

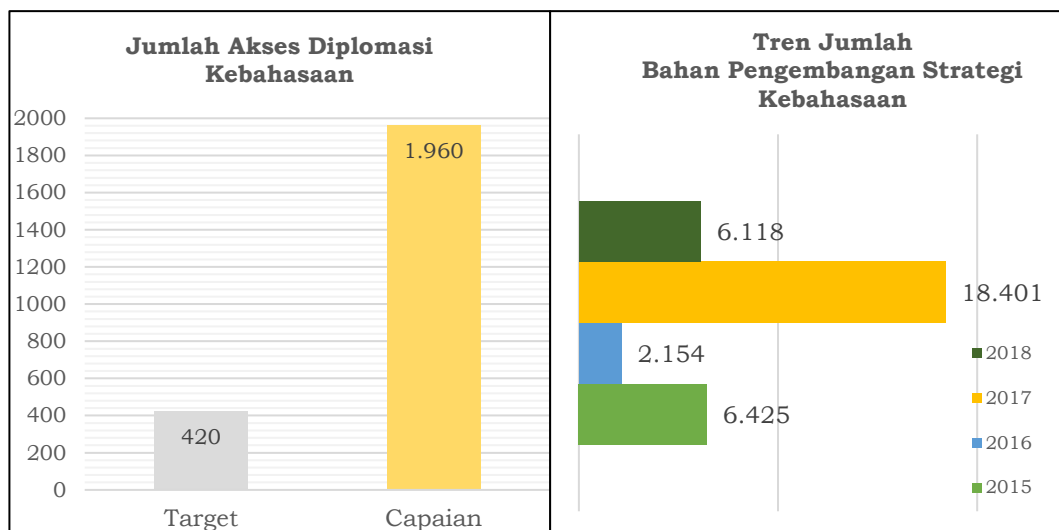
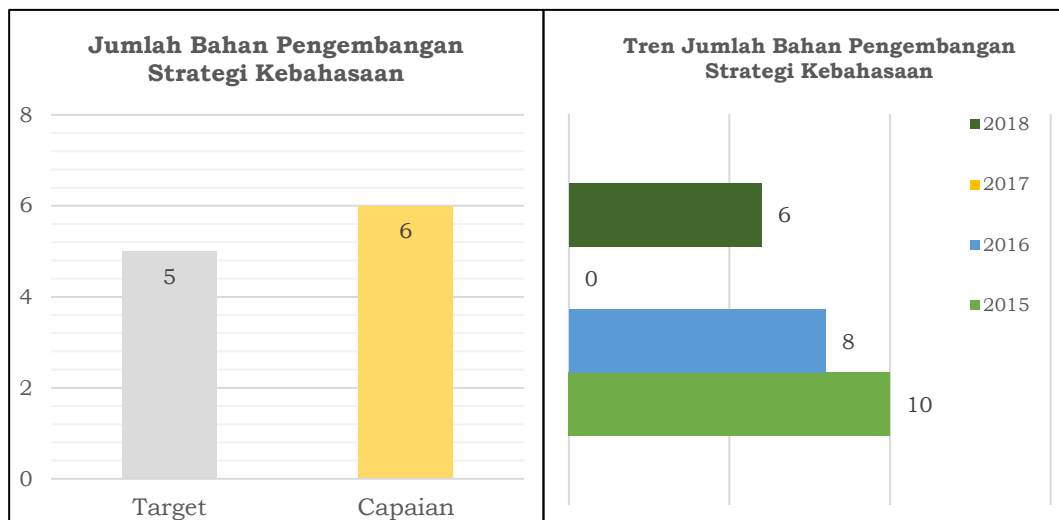
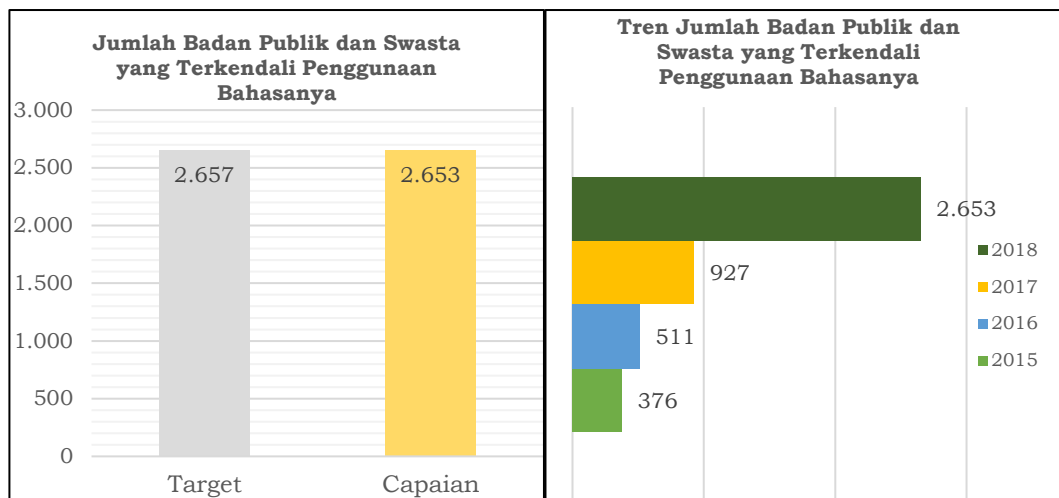
**Dadang Sunendar**

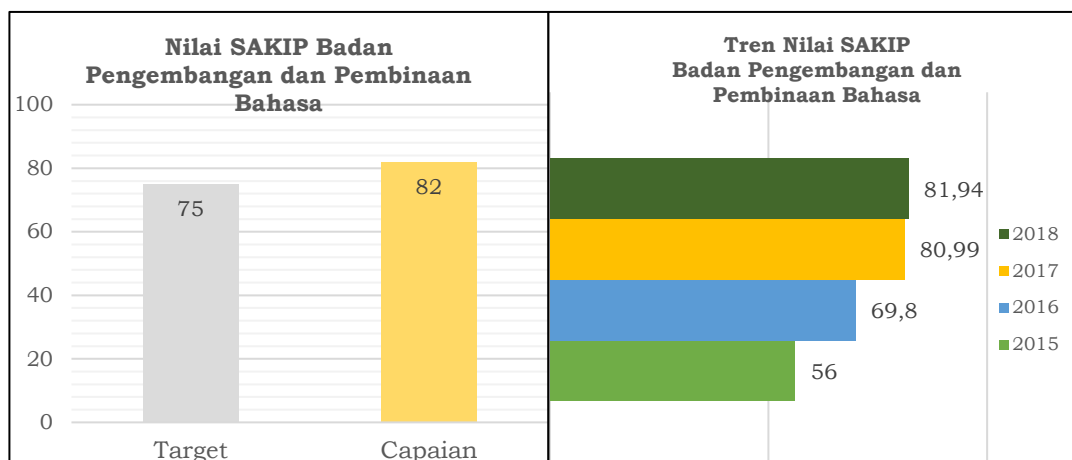
## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Badan Bahasa tahun 2018 menyajikan tingkat pencapaian enam SS dengan sembilan IKP sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada Bab III. Secara umum, capaian kerjanya adalah sebagai berikut.









Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. penetapan *output* 2019 agar sesuai dengan perubahan Renstra;
2. beberapa indikator yang belum mencapai 100% agar menambah target pada tahun 2019 untuk mengejar capaian renstra. Indikator yang belum tercapai: (1) jumlah bahan penelitian pengembangan dan perlindungan bahasa dan (2) sastra dan jumlah badan publik dan swasta yang terkendali penggunaan bahasanya.
3. distribusi target belum terencana dengan baik.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain:

1. menyesuaikan *output* mengikuti Renstra Revisi;
2. menambah target pada indikator kinerja agar terpenuhi capaian renstra pada tahun 2019 (akhir masa renstra 2015—2019).
3. sinkronisasi antara satker pusat dan daerah perlu dilakukan dengan agar distribusi target dapat terencana dan terlaksana dengan baik sehingga capaian kinerja menjadi baik dan tepat sasaran.

## DAFTAR ISI

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA TAHUN 2018

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi .....	3
D. Isu Strategis dan Permasalahan .....	6
 <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA .....</b>	 <b>13</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>17</b>
A. Capaian Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa .....	17
B. Realisasi Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa .....	66
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	
2. Perjanjian Kinerja	
3. Pengukuran Kinerja	



## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

### 1. Daftar Tabel

- Tabe 1 Jumlah Pegawai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  
1
- Tabe 2 Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  
1 Tahun 2017
- Tabe 3 Perubahan Target dan Anggaran pada Perjanjian Kinerja Badan  
1 Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2017
- Tabe 4 Alokasi Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  
1 Tahun 2017
- Tabe 5 Skor Rata-Rata *PISA* Tahun 2012 dan 2015  
1
- Tabe 6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Skor *PISA* di  
1 Tahun 2019 Sebesar 414 Tahun 2017
- Tabe 7 Pencapaian IKP Jumlah Hasil Pengembangan Bahasa dan Sastra  
1 Tahun 2017
- Tabe 8 Capaian Aktivitas pada IKP Jumlah Hasil Pengembangan Bahasa  
1 dan Sastra
- Tabe 9 Pencapaian IKP Jumlah Pendidik yang Memiliki Predikat  
1 Kemahiran UKBI Unggul Tahun 2017
- Tabe 10 Pencapaian IKP Jumlah Pendidik Terbina dalam Penggunaan  
1 Bahasa dan Sastra Tahun 2017
- Tabe 11 Capaian Aktivitas pada IKP Jumlah Pendidik Terbina dalam  
1 Penggunaan Bahasa dan Sastra
- Tabe 12 Pencapaian IKP Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kesastraan  
1 Tahun 2017
- Tabe 13 Capaian Aktivitas pada IKP Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan  
1 Kesastraan

- Tab 14 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Mutu  
1 Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik (Persentase Kabupaten/Kota Penerima Anugerah Bahasa) Tahun 2017
- Tab 15 Pencapaian IKP Jumlah Masyarakat yang Terlayani Program  
1 Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Tahun 2017
- Tab 16 Capaian Aktivitas pada IKP Jumlah Masyarakat yang Terlayani  
1 Program Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
- Tab 17 Pencapaian IKP Jumlah Lembaga yang Terbina Penggunaan  
1 Bahasanya
- Tab 18 Capaian Aktivitas pada IKP Jumlah Lembaga yang Terbina  
1 Penggunaan Bahasanya
- Tab 19 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Menguatnya Komitmen  
1 Nasional Lintas-Kementerian dan Lembaga dalam Penginternasionalan Bahasa Indonesia Tahun 2017
- Tab 20 Capaian Aktivitas IKP Jumlah Akses Diplomasi Kebahasaan  
1
- Tab 21 Negara Tujuan Pengiriman Pengajar Bahasa Indonesia bagi  
1 Penutur Asing (BIPA) di Luar Negeri
- Tab 22 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah  
1 Penutur Muda Bahasa Daerah yang Hampir Punah Tahun 2017
- Tab 23 Pencapaian IKP Jumlah Bahasa dan Sastra Terlindungi  
1
- Tab 24 Pencapaian IKP Jumlah Daya Ungkap Bahasa yang  
1 Dikembangkan
- Tab 25 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Menguatnya Tata Kelola dan  
1 Sistem Pengendalian Manajemen Layanan Tata Kelola Penanganan Kebahasaan Tahun 2017

Tab 26 Realisasi Anggaran Per Belanja Badan Pengembangan dan  
1 Pembinaan Bahasa

Tab 27 Alokasi dan Realisasi Anggaran Satker di Lingkungan Badan  
1 Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2017

Tab 28 Alokasi dan Realisasi Anggaran Per *Output*  
1

Tab 29 Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis  
1

Tab 30 Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Indikator  
1

Tab 31 Sandingan Capaian Sasaran Strategis Badan Pengembangan  
1 Pembinaan Bahasa

## **2. Daftar Gambar**

Gambar 1 Pengumpulan Data Lapangan pada Penelitian Sikap Bahasa di  
r Wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste

Gambar 2 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir  
r Effendy, Meluncurkan Produk Badan Bahasa pada Puncak  
Peringatan Bulan Bahasa dan Sastra 2017

Gambar 3 Bagan Organisasi Badan Pengembangan dan Pembinaan  
r Bahasa

Gambar 4 Bagan Organisasi Sekretariat Badan Pengembangan dan  
r Pembinaan Bahasa

Gambar 5 Bagan Organisasi Pusat Pengembangan dan Pelindungan  
r

Gambar 6 Bagan Organisasi Pusat Pembinaan  
r

Gambar 7 Bagan Organisasi Pusat Pengembangan Strategi dan  
r Diplomasi Kebahasaan

Gambar 8 Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis

r

Gambar 9 Mendikbud Didampingi Kepala Badan Bahasa Berfoto Bersama Pemenang Anugerah Kebahasaan pada Puncak Bulan Bahasa 2017

r

Gambar 10 Pembukaan Kegiatan Peningkatan Kompetensi BIPA bagi Delegasi Rusia di Kantor Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK), Sentul, Jawa Barat

r

Gambar 11 Bahan Bacaan dalam rangka Gerakan Literasi Nasional (GLN)

r

Gambar 12 Pertemuan Penulis Bahan Bacaan Literasi dalam rangka Penyempurnaan Bahan Bacaan Literasi

r

Gambar 13 Sidang Komisi Istilah

r

Gambar 14 Aplikasi Pengayaan Kosakata Bahasa Indonesia Daring Versi Desktop

r

Gambar 15 Sampul Terbitan Buku *Tata Bahasa Baku Indonesia Edisi Keempat*

r

Gambar 16 Uji Coba Pedoman Standar Kebahasaan dan Kesastraan

r

Gambar 17 Sidang Validasi Soal UKBI sebagai Langkah Akhir dalam Penyusunan Instrumen Soal

r

Gambar 18 Pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)

r

Gambar 19 Bengkel Sastra bagi Guru

r

Gambar 20 Perjalanan Badan Bahasa Menuju Simpang Susun Semanggi

r

Gambar 21 Mendikbud Memberikan Sambutan pada Pembekalan Pengajar BIPA di PPSDK, Sentul

r

Gamba 22 Pengajaran BIPA di *Vanimo Secondary School*, Papua Nugini  
r

Gamba 23 Puncak Acara Revitalisasi Bahasa Rote Berbasis Komunitas di  
r Nusa Tenggara Timur

Gamba 24 Alokasi Anggaran Per Kegiatan di Lingkungan Badan Bahasa  
r

Gamba 25 Sandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Badan  
r Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2017

Gamba 26 Realisasi Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan  
r Bahasa Per Satker

Gamba 27 Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Belanja Tahun 2017  
r

Gamba 28 Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis  
r

Gamba 29 Mendikbud, Kepala Badan Bahasa, dan Duta Bahasa Seluruh  
r Indonesia pada Puncak Acara Bulan Bahasa dan Sastra 2017

## **A. Gambaran Umum**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) merupakan satuan kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Badan Bahasa merupakan organisasi Eselon I yang disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

Badan Bahasa menjadi salah satu lembaga Kemdikbud tertua yang cikal-bakalnya sudah dirintis sebelum Indonesia merdeka. Sejak tahun 1930, Badan Bahasa fokus untuk menangani persoalan kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Secara lengkap, perjalanan sejarah Badan Bahasa dapat dilihat melalui laman resmi Badan Bahasa: [badanbahasa.kemdikbud.go.id](http://badanbahasa.kemdikbud.go.id).

Sejak 31 Desember 2015, Badan Bahasa dipimpin oleh Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum. sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Jumlah SDM sebanyak 1247 orang. Badan Bahasa mempunyai wilayah kerja di seluruh Indonesia.

Badan Bahasa menjalankan tugas dan fungsi pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Dalam PP 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, Badan Bahasa diberi amanah untuk melakukan (1) upaya memodernkan bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta



mengupayakan peningkatan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional; (2) pembinaan bahasa sebagai upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat; (3) perlindungan bahasa sebagai upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya; serta (4) peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional yang bertujuan untuk menunjukkan jati diri dan meningkatkan daya saing bangsa.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Organisasi
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk



Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019

### **C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada Pasal 648, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di





bidang bahasa dan sastra. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 648, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra; b. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra; d. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagan struktur organisasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah sebagai berikut.

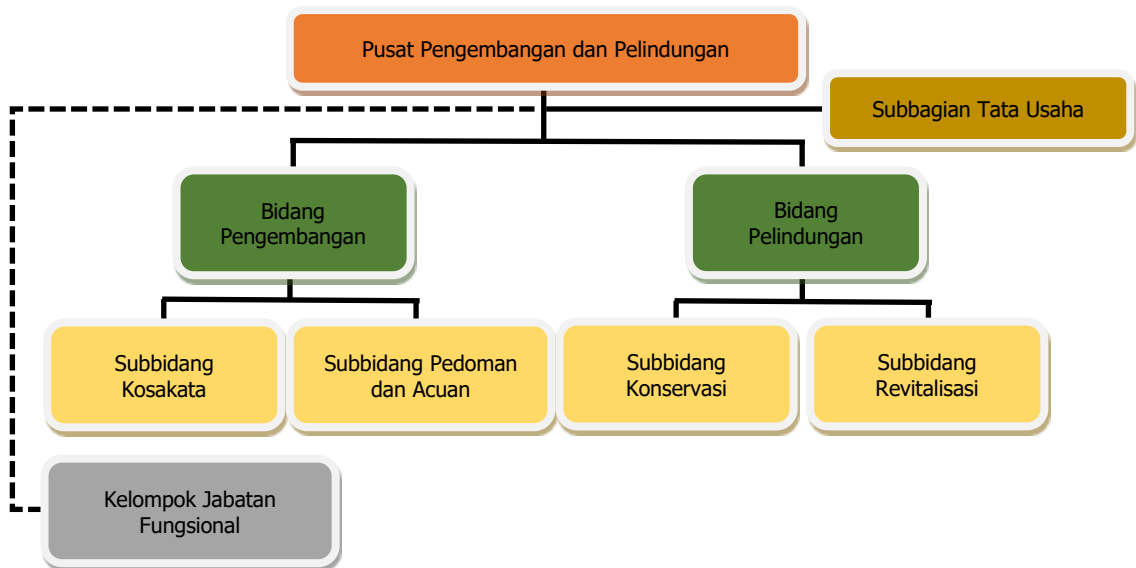
### **BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**



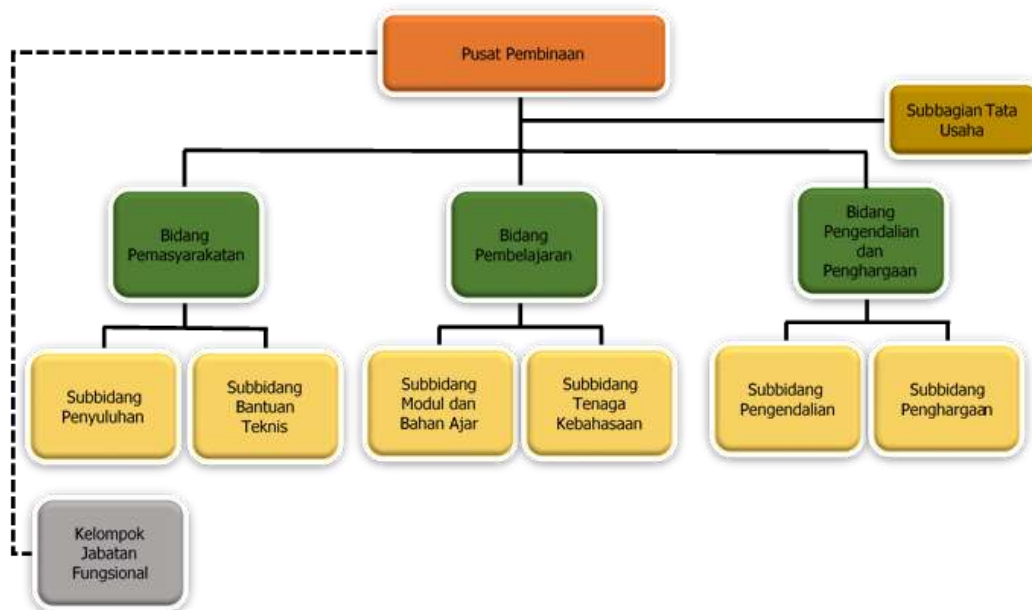
### **SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGANDAN PEMBINAAN BAHASA**



## PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN



## PUSAT PEMBINAAN



## PUSAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN DIPLOMASI KEBAHASAAN



## UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI DAN KANTOR BAHASA



### D. Isu Strategis/Permasalahan

Amanah Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 belum secara maksimal dapat dilaksanakan oleh Badan Bahasa. Persoalan kurang optimalnya koordinasi dengan unit utama lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) masih terjadi. Terkait dengan target



tenaga pendidik yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) misalnya, Badan Bahasa tidak lagi diperbolehkan untuk menjadikannya. Sementara, Badan Bahasa sebagai salah satu unit utama yang turut bertanggung jawab terhadap kemajuan pendidikan di seluruh Indonesia berupaya terus melakukan peningkatan kemahiran berbahasa para pendidik. Dengan harapan, guru menjadi mahir penggunaan bahasa Indonesia dapat mendorong meningkatnya nilai UN bahasa Indonesia. Solusi yang ditawarkan dengan melakukan kerja sama terkait dengan tenaga pendidik belum dapat dilaksanakan oleh kedua unit utama karena kedua unit utama tidak memiliki sasaran strategis yang sama.

Persoalan lain yang perlu mendapatkan perhatian ialah persoalan terbatasnya anggaran perjalanan dinas untuk pelaksanaan penanganan kebahasaan dan kesastraan di wilayah kepulauan. Hal tersebut menjadi penghambat pelaksanaan aktivitas yang membutuhkan perjalanan mengikat, misalnya pelaksanaan penyuluhan di wilayah kepulauan urung dilaksanakan sehingga pelaksanaannya diubah di ibukota provinsi. Persoalan tersebut berulang setiap tahun.

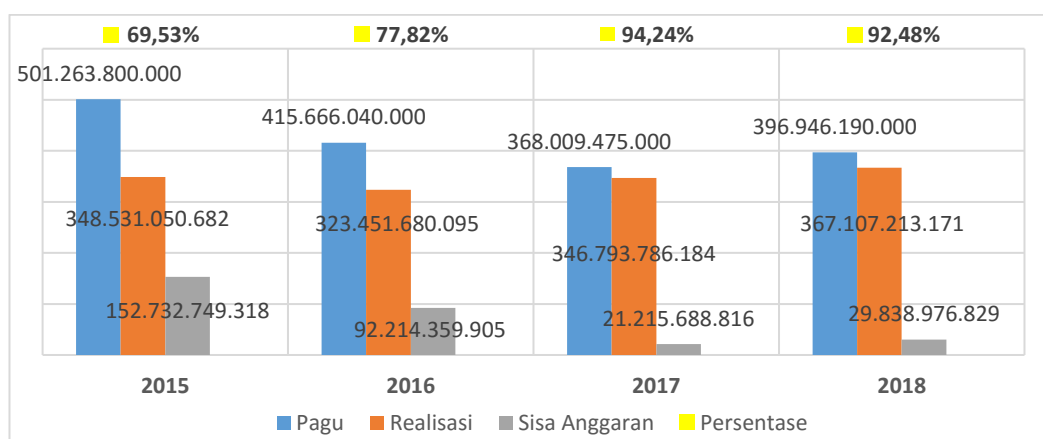
Selain itu, persoalan terkait perubahan Renstra yang termaktub dalam Permendikbud 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019, Badan Bahasa harus memetakan kembali capaian yang telah dilaksanakan sejak 2015—2018. Persoalan lain yang harus dihadapi oleh Badan Bahasa, *output* generik untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis (SS) “Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Teknis di Lingkungan Badan Bahasa” sulit diukur ketercapaiannya. Setiap



indikator pada SS tersebut hanya menargetkan masing-masing satu layanan sehingga capaiannya sulit diukur.

Selain persoalan yang harus dituntaskan, Badan Bahasa juga menghadapi berbagai tantangan. Tantangan rendahnya serapan anggaran selama tahun anggaran (TA) 2015—2016 sedikit banyaknya berpengaruh terhadap kinerja Kemendikbud secara keseluruhan. Hal itu tentunya berdampak pada persepsi atas kinerja Badan Bahasa. Rendahnya penyerapan itu mendorong Badan Bahasa untuk terus memperbaiki diri untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran. Optimalisasi penyerapan berdampak positif sehingga pada tahun 2017 hingga tahun 2018, Badan Bahasa mampu menyerap anggaran lebih dari 90%.

### Capaian Daya Serap Badan Bahasa 2015—2018



Tantangan berikutnya adalah penunjukan Badan Bahasa sebagai koordinator gerakan literasi di lingkungan Kemendikbud oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2017. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menginstruksikan Kepala Badan Bahasa untuk menjadi penggerak utama program literasi di lingkungan Kemendikbud, dengan Badan Bahasa menjadi koordinator utama. Kendati menjadi beban tambahan, instruksi tersebut



merupakan tantangan baru bagi Badan Bahasa untuk mengembankan kepercayaan dalam mendorong gerakan literasi yang lebih masif dan terorganisasi. Oleh karena itu, menjadi koordinator gerakan literasi yang kemudian diberi nama Gerakan Literasi Nasional, memberi tantangan baru bagi Badan Bahasa.

Tantangan lainnya adalah menggiatkan pencapaian prioritas program pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, atau yang dalam nomenklatur perencanaan disebut Tujuh Program Prioritas. Tujuh Program Prioritas merupakan pengejawantahan dari visi dan misi Kepala Badan Bahasa. Sebagai Pejabat Eselon I, Kepala Badan menerjemahkan rencana strategis (Renstra) Badan Bahasa 2015—2019 ke dalam tujuh fokus kegiatan. Ketujuh fokus tersebut adalah

1. BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing);
2. Kosakata Bahasa Daerah;
3. Tempat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (TUKBI);
4. Instrumen Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia;
5. Gerakan Literasi Nasional;
6. Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik;
7. Kamus dan Pengembangan Istilah.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Badan Bahasa perlu merancang dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran (rencana kerja pemerintah/RKP 2018) yang strategis dan sistematis dan rencana kerja (Renja 2018) dengan berdasarkan pada skala prioritas.

Dalam rancangan RKP 2018 dan Renja 2018, Badan Bahasa menyusun kerangka ini berlandaskan pada Renstra Badan Bahasa



2015—2019 (renstra awal berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015). Pada April 2018, *output* yang dihasilkan pada RKP 2018 harus disesuaikan dengan indikator baru yang terdapat dalam Permendikbud Nomor 12 Tahun 2018. Meskipun terdapat perubahan pada Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan beserta indikatornya, arah dan kebijakan strategis Badan Bahasa tidak ada perubahan. Arah dan kebijakan Badan Bahasa untuk memenuhi sasaran strategis pendidikan dan kebudayaan masih tetap sama seperti Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015, yakni

- a. meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela ipteks dan penguat daya saing indonesia; dan
- b. meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN.

Sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut diturunkan ke dalam Renstra Badan Bahasa, yakni

- a. meningkatnya jumlah judul buku pengayaan literasi baca;
- b. meningkatnya jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional yang mengikuti pengujian UKBI;
- c. meningkatnya bahasa dan sastra berkembang dan terlindungi;
- d. meningkatnya pengendalian bahasa Indonesia di ruang publik;
- e. meningkatnya peran bahasa Indonesia melal
- f. ui pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan di tingkat ASEAN;
- g. menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen layanan tata kelola penanganan kebahasaan.

Permasalahan-permasalahan Badan Bahasa tahun 2018 dapat dirumuskan sebagai berikut:



- a. masih rendahnya minat baca siswa;
- b. kurangnya ketersediaan bahan bacaan sebagai bahan pengayaan bahan ajar;
- c. minimnya upaya penjenamaan badan bahasa melalui produk-produk kebahasaan dan kesastraan;
- d. kurangnya jumlah kosakata KBBI, terutama jika dibandingkan dengan kamus-kamus bahasa asing;
- e. rendahnya sumbangan bahasa daerah terhadap KBBI;
- f. rendahnya daya saing bahasa Indonesia terhadap bahasa asing;
- g. rendahnya sikap positif masyarakat terhadap penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik;
- h. rendahnya perhatian masyarakat, khususnya pemerintah daerah, terhadap bahasa daerah dan sastra daerah yang semakin hari semakin terabaikan;
- i. kurangnya apresiasi masyarakat terhadap karya-karya sastra daerah, baik lisan maupun tulis;
- j. terbatasnya akses penutur asing terhadap bahasa Indonesia; dan
- k. kurangnya dokumentasi kebahasaan dan kesastraan di Indonesia.

Pada tahun 2018, permasalahan-permasalahan tersebut masih menjadi fokus perhatian Badan Bahasa untuk ditangani secara rutin. Demi mencapai sasaran yang ditetapkan, diperlukan perencanaan program/kegiatan dan anggaran yang andal, pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran yang tertib dan disiplin, dan pemantauan serta pelaporan yang akuntabel. Badan Bahasa, yang memiliki 34 Satker baik pusat maupun daerah, berkewajiban menyusun program, kegiatan, dan penganggaran yang bertujuan untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan tersebut perlu penanganan khusus.





Bukanlah persoalan mudah untuk menangani dan mengatasi berbagai permasalahan kebahasaan dan kesastraan di atas. Diperlukan sumber daya yang unggul dan mumpuni agar program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Hal ini memunculkan permasalahan berikutnya, yakni ketersediaan sumber daya manusia dan perangkat fasilitas pendukung. Secara struktural, UPT Badan Bahasa tersebar di 30 provinsi dengan komposisi jumlah SDM yang relatif kecil dan tidak seimbang antara satu UPT dengan UPT lainnya. Di samping itu, dukungan sarana dan prasarana juga masih sangat terbatas. Ini terlihat pada, misalnya, 13 kantor bahasa yang masih belum memiliki gedung perkantoran. Dengan kata lain, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur/sarana dan prasarana tersebut menambah permasalahan tersendiri bagi Badan Bahasa dalam menjalankan tugas dan fungsi pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di Indonesia.



Visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2015—2019: **Terwujudnya Insan Berkarakter dan Jati Diri Bangsa melalui Bahasa dan Sastra Indonesia**. Visi tersebut dapat dimaknai sebagai upaya Badan dalam mendukung visi kementerian dalam membentuk insan pendidikan dan kebudayaan. Insan berkarakter dan berjati diri yang dimaksud dalam visi tersebut dimaknai sebagai insan yang memiliki karakter keindonesiaan dalam setiap bentuk kecerdasan yang diperoleh. Insan berkarakter keindonesiaan dalam kecerdasan spiritualnya, kecerdasan emosional dan sosialnya, kecerdasan intelektualnya, serta kecerdasan kinestetisnya. Sarana yang dikembangkan, dibina, dan dilindungi dalam mendukung visi kementerian adalah sarana bahasa dan sastra.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Bahasa menetapkan misi, yakni

- a. meningkatkan mutu kebahasaan dan pemakaiannya;
- b. meningkatkan keterlibatan peran kebahasaan dalam membangun ekosistem pendidikan dan kebudayaan;
- c. meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
- d. meningkatkan peran aktif diplomasi dalam internasionalisasi kebahasaan.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015—2019 telah ditetapkan tujuan strategis pembangunan pendidikan yang berkaitan dengan penanganan kebahasaan dan kesastraan di Indonesia termaktub dalam Tujuan 5 (T5), yaitu



Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan.

Tujuan strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah **Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Bahasa Indonesia serta Pemakaian Bahasa sebagai Sarana Pencerdasan Bangsa.**

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis tersebut diperlukan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2019. Sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya mutu bahasa Indonesia dan pemakaiannya sebagai penghela ipteks dan penguat daya saing Indonesia.
2. Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN.

Tujuan strategis dan sasaran strategis 2015—2019 dicapai dengan menggunakan strategi pencapaian sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi dalam pengelolaan bahasa dan sastra;
2. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra secara terarah, sistematis, dan berkelanjutan dengan fokus pada pelibatan publik dan pemanfaatan media baru;
3. Peningkatan mutu berbahasa melalui inovasi pembelajaran bahasa pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal;
4. Penguatan jejaring dan kerja sama kebahasaan di tingkat wilayah, nasional, dan internasional;
5. Peningkatan promosi kebahasaan untuk peluasan wilayah pakai bahasa Indonesia di luar negeri.



Dalam rangka mencapai tujuan strategis, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2019. Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2019 sesuai dengan Permendikbud 22 Tahun 2015 dan Permendikbud 12 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019 (Renstra Revisi).

Berikut ini Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2019 sesuai dengan Permendikbud 22 Tahun 2015.

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target	Anggaran
<b>1</b>	Meningkatnya Skor PISA Tahun 2019 Sebesar 414	1 Jumlah Hasil Pengembangan Bahasa dan Sastra	33.734 Lema	22.540.978.000
		2 Jumlah Pendidik yang Memiliki Predikat Kemahiran UKBI Unggul	240 Orang	
		3 Jumlah Pendidik Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra	44.600 Orang	
		4 Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kesastraan	43 Naskah	
<b>2</b>	Meningkatnya Mutu Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik (Persentase Kabupaten/Kota Penerima Anugerah Bahasa)	1 Jumlah Masyarakat yang Terlayani Program Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	109.430 Orang	4.596.695.000
		2 Jumlah Lembaga yang Terbina Penggunaan Bahasanya	195 Lembaga	
<b>3</b>	Menguatnya Komitmen Nasional Lintas-Kementerian dan Lembaga dalam Penginternasionalan Bahasa Indonesia	1 Jumlah Akses Diplomasi Kebahasaan	3.623 Orang	36.334.801.000
<b>4</b>	Meningkatnya Jumlah Penutur Muda Bahasa Daerah yang Hampir Puna	1 Jumlah Bahasa dan Sastra Terlindungi	24 Bahasa dan Sastra	87.782.522.000
		2 Jumlah Daya Ungkap Bahasa yang Dikembangkan	81.934 Kosakata	



<b>5</b>	Menguatnya Tata Kelola dan Sistem Pengendalian Manajemen Layanan Tata Kelola Penanganan Kebahasaan	1 Nilai LAKIP Badan Pengembangandan Pembinaan Bahasa	84	245.691.194.000
----------	--	--	----	-----------------

Berikut ini Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2019 sesuai dengan Permendikbud 12 Tahun 2018.

	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran</b>
<b>1</b>	Meningkatnya Jumlah Judul Buku Pengayaan Literasi Baca	1 Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kesastraan	373 Naskah	8.134.518.000
<b>2</b>	Meningkatnya Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Mengikuti Pengujian UKBI	1 Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Dibina Kemahiran Berbahasa Indonesiannya	58.673 Orang	57.742.353.000
<b>3</b>	Meningkatnya Bahasa dan Sastra Terkembangkan dan Terlindungi	1 Jumlah Bahasa Terkembangkan	59.912 Kosakata	6.400.370.000
		2 Jumlah Bahasa dan Sastra Terlindungi	46 Bahasa dan Sastra	6.408.037.000
		3 Jumlah Bahan Penelitian Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	186 Naskah	8.710.266.000
<b>4</b>	Meningkatnya Pengendalian Bahasa Indonesia di Ruang Publik	1 Jumlah Badan Publik dan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya	2.657 Lembaga	14.783.230.000
<b>5</b>	Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia melalui Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan di Tingkat ASEAN	1 Jumlah Bahan Pengembangan Strategi Kebahasaan	56 Naskah	2.443.167.000
		2 Jumlah Akses Diplomasi Kebahasaan	420 Orang	22.093.712.000
<b>6</b>	Menguatnya Tata Kelola dan Sistem Pengendalian Manajemen Layanan Tata Kelola Penanganan Kebahasaan	1 Nilai LAKIP Badan Pengembangandan Pembinaan Bahasa	75	43.994.484.000



**A. Capaian Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2018, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan enam sasaran strategis dan sembilan indikator kinerja. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2018.

**Sasaran #1 Meningkatnya Jumlah Judul Buku Pengayaan Literasi Baca**

Indikator kinerja:

**1. Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kesastraan**

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019, SS “Meningkatnya Jumlah Judul Buku Pengayaan Literasi Baca” serta indikator Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kesastraan merupakan hasil revisi atas SS “Meningkatnya Skor PISA di Tahun 2019 sebesar 414”. Keputusan tersebut atas saran Kepala Biro PKLN, Kemdikbud, yang menyatakan bahwa targetnya sulit untuk dicapai. Badan Bahasa terkait dengan hasil pengukuran *Programme for International Student Assessment (PISA)* sudah melakukan berbagai upaya, termasuk dengan bekerja sama dengan Puspendik. Selain itu, Badan Bahasa juga melakukan penyusunan soal-soal yang serupa dengan tes *PISA* dan melakukan uji coba ke beberapa sekolah. Sayangnya, target tersebut telah direvisi, padahal SS tersebut salah satu upaya Badan Bahasa agar terjun langsung ke dunia pendidikan.



Untuk mencapai indikator kinerja “Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kesastraan”, Badan Bahasa melakukannya melalui penyediaan buku bacaan literasi. Penyediaan buku bacaan literasi untuk menjalankan amanah Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti yang mendorong pembiasaan 15 menit sebelum belajar dengan membaca buku-buku yang dapat meningkatkan literasi siswa. Penyediaan Buku Bacaan Literasi dilakukan melalui kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Literasi Membaca dan Menulis. Bahan bacaan literasi tersebut ditujukan untuk satuan pendidikan SD, SMP, dan SMA.

Selain itu, sebagai wujud pelaksanaan Permendikbud tersebut, Badan Bahasa juga ditunjuk sebagai koordinator Gerakan Literasi Nasional (GLN) sejak tahun 2016 sehingga capaian dari Indikator Kinerja “Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kebahasaan” dapat terlaksana dengan baik.

#### **IKP #1 Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kebahasaan**

Pencapaian Indikator Kinerja “Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kebahasaan” melalui penyediaan buku bacaan literasi dicapai melalui output Bahan Bacaan Pengayaan Pelajaran Bahasa Indonesia yang merupakan salah satu output yang terdapat pada Kegiatan Pembinaan Bahasa dan Sastra. Tahapan capaian kinerja pada Tahun 2016—2018 tersebut memiliki keluaran berupa buku-buku bahan bacaan literasi yang telah dinilai sebagai buku nonteks pelajaran untuk jenjang SD, SMP, dan SMA serta jenjang kelas awal.

Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Renstra 2019	Capaian Renstra 2019
		Target	Realisasi	%		
Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kebahasaan	302	400	545	136,3%	600	545



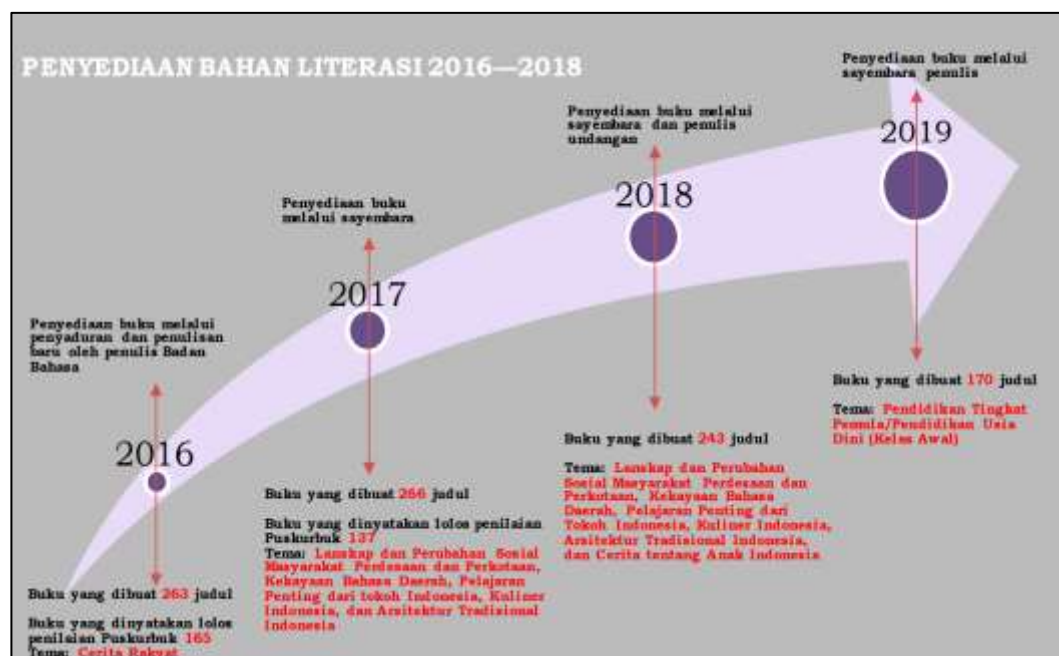
Pada tahun 2018 capaian indikator tersebut sebesar 136,3%. Hal itu didapat dari target Renstra Badan Bahasa yang setiap tahunnya sebanyak 200 buku yang diusulkan penilaiannya, seluruhnya lolos sebagai buku nonteks pelajaran bahasa dan sastra oleh Puskurbuk sebagai lembaga penilai buku sebanyak 243 buku. 243 buku tersebut adalah 189 buku dari penyediaan buku literasi yang diusulkan penilaiannya oleh Pusat Pembinaan dan 54 buku yang diusulkan oleh balai/kantor bahasa (UPT Badan Bahasa di daerah).



Sementara itu, capaian indikator ini dari tahun 2016—2018 adalah sebanyak 545 buku yang sudah dinilai dan mendapat SK Puskurbuk sebagai buku bacaan nonteks pelajaran bahasa dan sastra. Capaian tersebut melebihi target sebesar 136,3%, yaitu dari 600 buku yang ditargetkan sampai dengan tahun 2018, buku yang sudah disediakan sebanyak 545 buku. Keberhasilan tersebut tidak luput dari peran serta balai/kantor bahasa yang selama 2 tahun turut melakukan aktivitas penyediaan buku bacaan literasi. Pencapaian Indikator Kinerja “Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kebahasaan” melalui Penyediaan Buku Bacaan Literasi dapat dilihat pada peta jalan sebagai berikut.







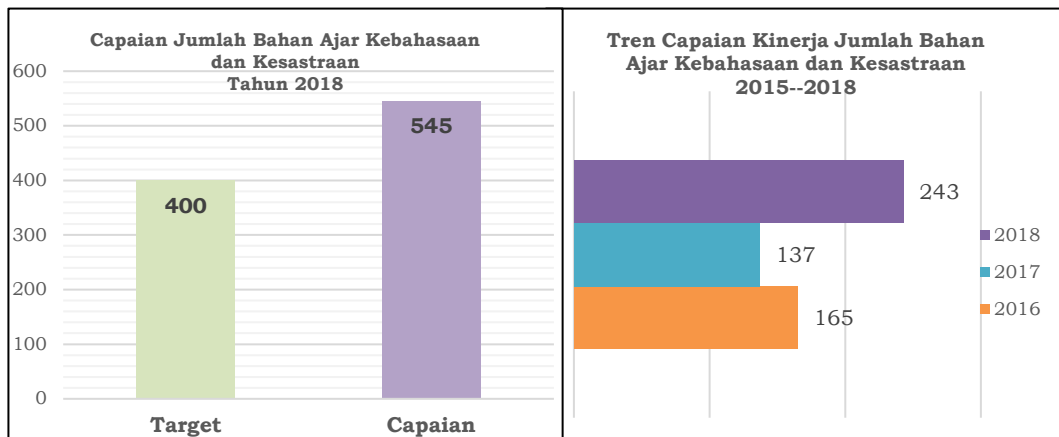
Berikut ini rekap capaian “Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kesastraan” yang diperoleh melalui dua aktivitas yang dilaksanakan Badan Bahasa. Rekap ini merupakan aktivitas yang dilakukan satker Pusat Pembinaan dan Balai/Kantor Bahasa di seluruh Indonesia.

Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kesastraan	Target	Capaian	%	Keterangan
Bahan Bacaan Pengayaan Pelajaran Bahasa Indonesia	202 naskah	189 naskah	93,56%	Pusat Pembinaan
Jumlah Bahan dan Modul Pembelajaran Bahasa dan Sastra	171 naskah	160 naskah	93,57%	Balai/Kantor Bahasa
<b>Total</b>	<b>373 naskah</b>	<b>349 naskah</b>	<b>93,57%</b>	<b>Badan Bahasa</b>

Target pada Renstra Badan Bahasa dengan Perjanjian Kinerja Badan Bahasa berbeda: Renstra sebesar 200 naskah, pada PK sebesar 373 naskah. 373 naskah yang ditargetkan pada PK merupakan upaya Badan Bahasa untuk mengejar capaian 2019 yang pada tahun 2017 tidak mencapai target. Selain itu, target sebesar 373 naskah untuk mencapai target peta jalan penyediaan bahan literasi hingga 2019 yang sebesar 770 naskah. Peta jalan tersebut juga mendorong agar Gerakan Literasi Nasional dengan menyediakan buku-buku dapat mendorong meningkatkan literasi



membaca siswa. Berikut ini tren capaian “Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kesastraan”.



**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

## PENGUATAN BUDAYA LITERASI KUNCI MEMAJUKAN NEGERI

Gerakan Literasi Nasional menjadi upaya untuk menabur semangat literasi ke seluruh Indonesia. Harus didukung pihak keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Berikut ini semua masyarakat Indonesia menjadi pembelajar sepanjang hayat. Salah satu indikatornya sebagian komunitas pembaca seperti di negara-negara maju.

Berangkat dari hal itu, ini penguatan literasi menjadi salah satu pokok bahasan dalam Rencana Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RMPK) 2019. “Kita harus memastikan sekolah mendorong anak-anak untuk cinta membaca,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy saat memberikan arahan teknis dalam RNP 2019, di Depok, Jawa Barat, Senin (10/7/2019).

Pada 2017 lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menginisiasi Gerakan Literasi Nasional (GLN) sebagai upaya pemerintah pusat menguatkan kemampuan literasi masyarakat. Gerakan ini meliputi tiga ranah utama, yakni Gerakan Literasi Keluarga, Gerakan Literasi Sekolah, dan Gerakan Literasi Masyarakat.

Kemampuan literasi yang memadai harus menjadi modal dasar memasuki era revolusi industri 4.0. Literasi juga menjadi fondasi menyiapkan SDM menghadapi bonus demografi 2010 mendatang. Untuk itu, diperlukan “literasi baru” selain literasi lama. Literasi lama atau dasar mencakup kompetensi baca tulis dan berhitung (calistung).

Sedangkan literasi baru mencakup literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia.

“Kita tidak akan mudah mencapai bonus demografi bila tingkat literasi masih rendah. Tingkat persaingan antarbangsa akan ditentukan oleh kemampuan masyarakat merespons perkembangan. Respons yang baik tentu dilatibehakangi kemampuan literasi yang kuat, dan bukan sekadar literasi dasar,” ujar Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB), Dadang Suseandar.

Berbagai gerakan literasi yang dilakukan Kemendikbud dan para pegiat literasi terbukti telah meningkatkan angka buta aksara dari 3,36 persen pada 2014 menjadi 2,07 persen pada tahun 2017. Dengan demikian angka melek aksara meningkat dari 96,64 persen ke 97,93 persen dalam kurun waktu tiga tahun.

Hasil kajian literasi Badan Bahasa melalui Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK) tahun 2018 juga menunjukkan tingkat literasi peserta didik cukup baik. “Kami melakukan kajian terhadap sekitar 6.400 siswa kelas X di 208 sekolah di 34 provinsi. Rata-rata nilai yang diperoleh sebesar 48,9 dari total 800. Artinya, kita juga harus tetap menjaga optimisme bahwa masyarakat Indonesia juga bisa maju,” kata Dadang.

Namun, upaya peningkatan literasi Kemendikbud harus didukung secara massif oleh semua kalangan, mulai dari keluarga sekolah, dan masyarakat. Sebagai upaya peningkatan literasi, Kemendikbud juga meluncurkan Dapok 2018 Data Pokok Kebahasaan dan Kesastraan yang dikelola BPPB dan Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK).

Saat ini tengah dikaji penguatan literasi untuk mempercepat GLN. “Sekarang baru ada Permenristekdikbud Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang menggariskan para pejabat sebelum pelantikan dimintai,” ujar Dadang, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dadang Suseandar

Seiring terus melatibehakangi sistem pendidikan, “Tidak ada negara maju yang masyarakatnya tidak terpelajar. Mari kita tingkatkan kapasitas dan kecakapan diri melalui kegiatan literasi sebagai modal dasar menuju negara yang bermartabat,” tutur Dadang. \*

## Sasaran #2 Meningkatnya Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Mengikuti Pengujian UKBI

Indikator kinerja:

1. Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Dibina Kemahiran Berbahasa Indonesianya

Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Mengikuti Pengujian UKBI dicapai melalui



kegiatan Pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). Guna mencapai SS “Meningkatnya Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Mengikuti UKBI”, Badan Bahasa berupaya terus meningkatkan pelayanan UKBI melalui strategi sebagai berikut.

- a. Penambahan jumlah tempat UKBI (TUKBI)
- b. Peningkatan mutu fasilitator UKBI
- c. Peningkatan aktivitas pendukung kemahiran berbahasa
- d. Penjajakan pembukaan TUKBI di luar negeri
- e. Peningkatan layanan UKBI melalui PNB

### **IKP #1 Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Dibina Kemahiran Berbahasa Indonesianya**


Capaian indikator jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional yang dibina kemahiran berbahasa Indonesianya pada tahun 2018 mencapai 150,51% atau sebesar 60.105 orang dari target 39.934 orang yang ditargetkan. Perolehan capaian ini jauh lebih besar dibandingkan dengan capaian yang ditargetkan pada tahun 2019 yang hanya sebesar 41.434 orang. Target tersebut telah terpenuhi hingga 348,5% atau sebesar 144.404 orang.

Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Renstra 2019	Capaian Renstra 2019
		Target	Realisasi	%		
<b>Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Dibina Kemahiran Berbahasa Indonesianya</b>	84.299	39.934	60.105	150,51%	41.434	144.404


Meskipun terlihat anomali atau tidak berimbang antara target dan capaian, pada kenyataannya capaian tersebut lebih banyak diperoleh dari segi kuantitas saja. Perubahan Renstra Badan Bahasa dan Kemendikbud pada pertengahan tahun 2018 ikut serta mengubah target pada indikator ini: yang semula fokus pada pendidik yang memiliki predikat kemahiran UKBI unggul menjadi tenaga profesional dan calon tenaga profesional yang dibina kemahiran berbahasa



Indonesianya. Perlu diketahui, untuk memperoleh pendidik yang memiliki predikat kemahiran UKBI unggul sangatlah tidak mudah. Seorang pendidik harus lulus dengan skor 525—674 (predikat unggul) sehingga memerlukan banyak target agar tercapai target yang ditetapkan 1.500 orang per tahunnya.




**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN




# UKBI

## UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA




**Apakah UKBI itu?**

UKBI adalah sarana uji untuk mengukur kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia lisan dan tulis.




**Apa yang diuji dalam UKBI?**

UKBI menguji keterampilan seseorang dalam memahami dengar, memahami bacaan, menulis, dan berbicara. Selain itu, UKBI menguji pemahaman seseorang dalam penerapan kaidah bahasa Indonesia.



**Materi apa yang diujikan dalam UKBI?**

Materi UKBI berupa penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah komunikasi dan laras bahasa. Materi itu bersumber dari wacana lisan sehari-hari di masyarakat serta wacana tulis di tempat umum, media massa, buku acuan, dan sebagainya.




**Bagaimana susunan soal UKBI?**

UKBI terdiri atas lima seksi dengan jenis soal pilihan ganda (Seksi I, II, dan III), presentasi tulis (Seksi IV), serta presentasi lisan (Seksi V).


Susunan soal UKBI tercantum di dalam tabel berikut.

Seksi	Jumlah	Alokasi waktu
Seksi I Mendengarkan	40 soal	30 menit
Seksi II Merespon Kaidah	25 soal	20 menit
Seksi III Membaca	40 soal	45 menit
Seksi IV Menulis	1 soal	30 menit
Seksi V Berbicara	1 soal	15 menit




**Siapa yang dapat menjadi peserta UKBI?**

Setiap penutur bahasa Indonesia, baik penutur jati maupun penutur asing dapat menjadi peserta UKBI.





**Di mana tempat pendaftaran dan pelaksanaan UKBI?**



Peserta dapat mendaftarkan diri dan mengikuti tes UKBI di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai/Kantor Bahasa di ibu kota provinsi, dan tempat uji kompetensi (TUK) yang telah ditetapkan atau dapat melalui pos-el layanan [ukbi@kemdikbud.go.id](mailto:ukbi@kemdikbud.go.id).



**Apa yang diperoleh peserta setelah menempuh UKBI?**

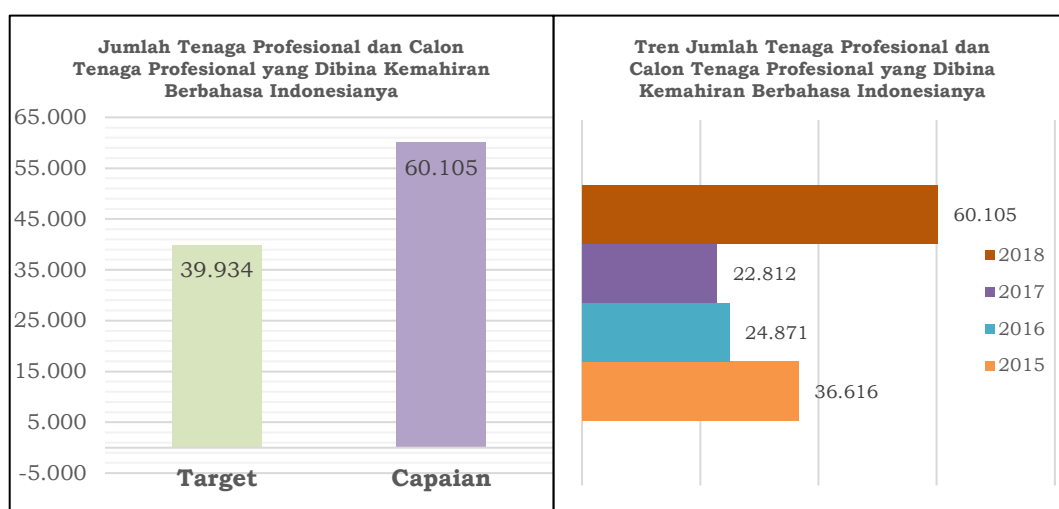
Peserta akan memperoleh laporan hasil uji berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

 [badanbahasa.kemdikbud.go.id](http://badanbahasa.kemdikbud.go.id)  
 @BadanBahasa

 @Badan.Bahasa  
 badanbahasakemdikbud



Berbeda dengan target pendidik yang memiliki predikat kemahiran UKBI unggul, untuk membina tenaga profesional dan calon tenaga profesional kemahiran berbahasa Indonesianya sangatlah mudah. Badan Bahasa hanya membutuhkan sejumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional yang akan dibina kemahiran berbahasa Indonesianya. Dengan kata lain, Badan Bahasa hanya membutuhkan kuantitas peserta daripada kualitas peserta yang harus berpredikat mahir. Seperti yang telah dijelaskan perubahan nomenklatur pada renstra itu sayangnya tidak diikuti dengan perubahan *output*. Berikut ini tren Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Dibina Kemahiran Berbahasa Indonesianya.



Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan adanya dukungan oleh aktivitas sebagai berikut:

- 1) Bimbingan Teknis Penyegaran Keterampilan Berbahasa Indonesia Tenaga Kebahasaan;
- 2) Bimbingan Teknis Fasilitator Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia dan Pengelola Tempat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia;
- 3) Bimbingan Teknis Tenaga Literasi: Dalam rangka Gerakan Literasi Nasional (GLN);
- 4) Bimbingan Teknis Calon Tenaga Penyuluh Bahasa dan Sastra;





- 5) Bimbingan Teknis Peningkatan Kemahiran Literasi dan Baca-Tulis; dan
- 6) Bimbingan Teknis Peningkatan Tenaga Penyunting Bahasa.

Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain disebabkan karena perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Beberapa langkah antisipasi yang diambil dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain.

- 1) Melakukan komunikasi dan koordinasi secara intens dengan para pemangku kepentingan dan calon peserta kegiatan demi lancarnya pelaksanaan kegiatan dan tercapainya target indikator kinerja.
- 2) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan semua pihak demi tercapainya target indikator kinerja.
- 3) Berikut rekapitulasi capaian “Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Dibina Kemahiran Berbahasa Indonesianya” yang diperoleh melalui aktivitas yang dilakukan oleh Pusat Pembinaan dan Balai/Kantor Bahasa.

Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Dibina Kemahiran Berbahasa Indonesianya	Target	Realisasi	%	Keterangan
Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra	650	655	100,77%	PUSBIN
Jumlah Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra	4.008	3.547	88,50%	PUSBIN
Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Mengikuti Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia	1.000	999	99,90%	PUSBIN
Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra	21.647	22.398	103,47%	UPT
Jumlah Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra	31.368	32.506	103,63%	UPT
<b>TOTAL</b>	<b>58.673</b>	<b>60.105</b>	<b>102,44%</b>	<b>BADAN BAHASA</b>



### Sasaran #3 Meningkatnya Bahasa dan Sastra Terkembangkan dan Terlindungi

Indikator kinerja:

1. Jumlah Bahasa Terkembangkan
2. Jumlah Bahasa dan Sastra Terlindungi
3. Jumlah Bahan Penelitian Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Renstra 2019	Capaian Renstra 2019
		Target	Realisasi	%		
1. Jumlah Bahasa Terkembangkan	110.000	112.000	112.000	100%	114.000	112.000
2. Jumlah Bahasa dan Sastra Terlindungi	20	46	46	100%	120	118
3. Jumlah Bahan Penelitian Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	878	346	180	52,02%	1.722	838

#### IKP #1 Jumlah Bahasa Terkembangkan

Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Renstra 2019	Capaian Renstra 2019
		Target	Realisasi	%		
	110.000	112.000	112.000	100%	114.000	98,25%

Bahasa Indonesia, sebagaimana bahasa modern lainnya, terus berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu, teknologi, dan seni. Perkembangan bahasa Indonesia dapat dilihat dari perkembangan tata bahasa, ejaan, dan leksikon atau kosakatanya. Perkembangan leksikon bahasa Indonesia tergambar dari pertumbuhan jumlah kosakata dan maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

KBBI merupakan hasil pembakuan dan kodifikasi bahasa Indonesia yang sekaligus mencerminkan kekayaan kosakata bahasa Indonesia. Kosakata tersebut merekam semua fakta kebahasaan yang meliputi perkembangan makna dan konsep yang masuk bersamaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam KBBI tersimpan kosakata dan istilah yang melimpah sebagai sarana untuk mengungkapkan berbagai macam gagasan dan pikiran. KBBI telah



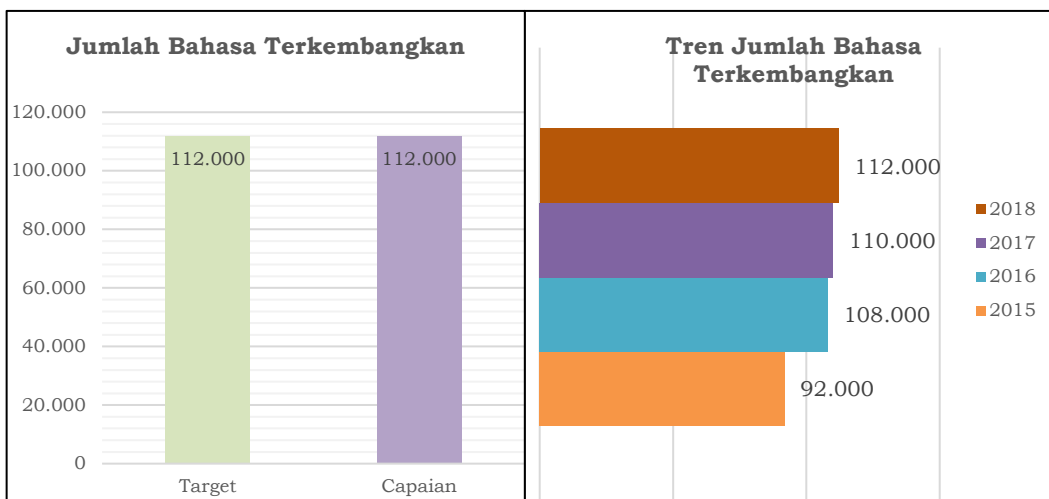
diterbitkan dalam lima edisi, yaitu KBBI Edisi Kesatu sampai dengan KBBI Edisi Kelima. Edisi kelima merupakan edisi daring dengan berbagai kelebihan dari edisi-edisi sebelumnya. KBBI diproyeksikan, tidak hanya, sebagai acuan kebahasaan yang berwibawa dan terpercaya, tetapi juga menghimpun semua potensi kebahasaan se-Indonesia.

KBBI Edisi Kelima (KBBI V) diluncurkan pada tanggal 28 Oktober 2016 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam versi cetak terbatas dan daring. Ketika diluncurkan, KBBI V memuat lebih dari 108.000 lema yang terdiri atas lebih dari 126.000 makna. Versi luring dengan basis Android dan iOS diluncurkan sebulan kemudian. Sejak pertama kali diluncurkan hingga minggu ketiga bulan Desember 2018, jumlah pencarian di KBBI Daring sudah mencapai 30.294.687 total pencarian dengan rata-rata angka pencarian sebesar 38.841 per hari. Jumlah total usulan yang masuk ke tim redaksi adalah lebih dari 44.390 usulan. Selain itu, jumlah total akun pengguna terdaftar KBBI Daring mencapai 29.882 akun.

KBBI Daring merupakan aplikasi yang memungkinkan pengguna kamus mengakses informasi melalui laman [kbbi.kemdikbud.go.id](http://kbbi.kemdikbud.go.id) setiap saat dan dari mana saja. Selain fitur pencarian, KBBI Daring juga dilengkapi dengan fitur usulan yang memungkinkan pengguna ikut berpartisipasi dalam pengembangan bahasa Indonesia. KBBI Daring mengandakan jaringan internet untuk operasinya. KBBI Luring (*offline*) merupakan aplikasi yang memungkinkan pengguna mengakses KBBI tanpa jaringan internet melalui ponsel pintar dengan basis Android dan iOS. Aplikasi ini sudah diunduh lebih dari sejuta kali dan mendapat nilai 4.7 dari nilai maksimal 5 serta mendapat 11.000 komentar di aplikasi Android.







**Pendaftaran (Buat Akun baru)**

**Nama Lengkap \*** Contoh: Liliyan Mayaramila

**Nama Tampilan \*** Contoh: liliyan

**Pos-el \*** Contoh: liliyan.mayaramila@gmail.com

**Kata Sandi \***

**Konfirmasi Kata Sandi**

☐ Saya bukan robot

**Daftarkan**

**Petunjuk**

Untuk mendaftarkan akun dalam KBBI Daring, pastikan Anda mendaftarkan **alamat pos-el yang sah**, bukan alamat pos-el yang dibuat-buat. Selanjutnya, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Isi:
  - Nama Lengkap: nama Anda yang sesungguhnya. Nama ini akan digunakan untuk menampilkan nama pembuat dan pengoreksi usulan.
  - Nama Tampilan: nama Anda untuk ditampilkan dalam laman KBBI daring (nickname dalam laman KBBI Daring)
  - Pos-el: **alamat pos-el sah Anda**, bukan alamat pos-el yang dibuat-buat
  - Kata Sandi: kata sandi untuk laman KBBI Daring (tidak harus sama dengan kata sandi untuk masuk ke alamat pos-el Anda\*)
  - Konfirmasi Kata Sandi: ditulis sama persis dengan kotak [Kata Sandi]
  - Captcha: tik "Saya bukan robot", tunjukkan bahwa Anda bukan robot/program dengan menjawab tantangan yang ditampilkan oleh Captcha (tantangan bawaan: memilih semua gambar yang sesuai), lalu klik [Verifikasi] atau [Lewati] sesuai dengan tantangan yang diberikan
2. Tekan tombol [Daftarkan]
3. Buka kotak masuk (inbox) alamat pos-el yang Anda daftarkan, Anda akan menerima pos-el dari alamat pos-el [kbbi.nirlulus@kemdikbud.go.id](mailto:kbbi.nirlulus@kemdikbud.go.id) (atau, jika alamat/domain pos-el utama sedang bermasalah, dari alamat pos-el [kbbidaringnirlulus@gmail.com](mailto:kbbidaringnirlulus@gmail.com)) dengan nama pengirim "KBBI Daring" dan ber subjek "Konfirmasi Akun Anda"
4. Buka pos-el dari KBBI Daring, tekan frasa **"tautan ini"** yang tertulis pada pos-el yang dikirim oleh KBBI Daring. Catatan: **jangan membalas** pos-el yang dikirim oleh alamat pos-el [kbbi.nirlulus@kemdikbud.go.id](mailto:kbbi.nirlulus@kemdikbud.go.id) atau [kbbidaringnirlulus@gmail.com](mailto:kbbidaringnirlulus@gmail.com). Nirl = tanpa → nirlulus = tanpa balasan. Jika saudara memiliki pertanyaan, silakan mengirimkan pos-el ke alamat pos-el [adminkbbi@kemdikbud.go.id](mailto:adminkbbi@kemdikbud.go.id)
5. Buka laman [kbbi.kemdikbud.go.id](http://kbbi.kemdikbud.go.id), tekan tautan **Masuk** yang terdapat pada sisi kanan atas laman KBBI Daring
6. Gunakan alamat pos-el dan kata sandi yang baru saja Anda daftarkan untuk masuk dalam laman KBBI Daring

\*untuk alasan keamanan, sebaiknya tidak ditulis sama dengan kata sandi untuk masuk ke alamat pos-el Anda.

Untuk mendukung pengembangan bahasa Indonesia, selain melalui KBBI daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melaksanakan program pengayaan kosakata bahasa Indonesia di



berbagai provinsi dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, pemangku/anggota komunitas adat, dosen, mahasiswa/pelajar, wartawan/jurnalis, pegiat media sosial/blogger, pengembang program aplikasi, pegiat/pemerhati bahasa, organisasi profesi, masyarakat perorangan, penulis, pekamus/leksikograf, pengembang istilah/terminolog, penerbit, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Pada tahun 2018, capaian kinerjanya telah berhasil sesuai target yang telah ditetapkan. Target tambahan kosakata pada tahun 2018 adalah sebanyak 2.000 kosakata. Dari target yang telah ditetapkan tersebut, berhasil teralisasi sebanyak 2.000 kosakata (100%). Capaian ini sama dengan capaian kinerja tahun 2017, yaitu mencapai 2.000 kosakata. Dengan penambahan 2.000 kosakata pada tahun 2018 NNB tersebut, maka jumlah kosakata dalam KBBI mencapai 112.000 kosakata. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada tahun 2019, yaitu 114.000 kosakata, maka capaian pada tahun 2018 tersebut telah mencapai 98,25% dan masih memiliki selisih atau kekurangan 2.000 kosakata (1,75%) yang akan dipenuhi pada tahun terakhir masa renstra, yaitu tahun 2019.

Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan adanya dukungan oleh program/kegiatan sebagai berikut:

1. Inventarisasi Kosakata;
2. Sidang Komisi Istilah;
3. Diseminasi Program Pengayaan Kosakata; dan
4. Penyusunan Korpus.





Seperti yang terlihat pada infografis, upaya untuk meningkatkan kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlu proses panjang. Tidak semua kosakata yang diperoleh dari seluruh Indonesia dapat serta-merta menjadi kosakata dalam KBBI. Oleh karena itu, pada Perjanjian Kinerja, Badan Bahasa menargetkan 59.912 kosakata. Selain untuk keperluan KBBI, kosakata yang diperoleh juga untuk mengembangkan berbagai kamus, termasuk kamus daerah. Produk



kamus meliputi kamus ekabahasa, kamus dwibahasa, kamus etimologi, kamus bidang ilmu, tesaurus, dan ensiklopedia. Penyusunan kamus ekabahasa, kamus dwibahasa, kamus etimologi, dan kamus bidang ilmu melibatkan para pakar dan kemudian disunting oleh para pekamus di Badan Bahasa. Penyusunan tesaurus meliputi tesaurus alfabetis dan tesaurus tematis. Penyusunan ensiklopedia meliputi ensiklopedia bahasa dan ensiklopedia sastra berupa artikel terkait bahasa dan sastra di Indonesia. Penyusunan ensiklopedia dilakukan oleh para pakar/peneliti bahasa dan sastra di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Pada tahun 2018 berhasil disusun sebanyak 10 kamus, yaitu sebagai berikut.

- a. Kamus Vokasi Bidang Agroteknologi
- b. Kamus Vokasi Bidang Kemaritiman
- c. Kamus Vokasi Bidang Industri Kreatif
- d. Kamus Vokasi Bidang Pariwisata
- e. Kamus Filologi
- f. Kamus Budaya Gayo
- g. KBBI Braille
- h. Kamus Etimologi Belanda
- i. Kamus Etimologi Jawa Kuno
- j. Ensiklopedia Sastra Indonesia



Capaian kosakata dari seluruh Indonesia yang diperoleh oleh Balai/Kantor Bahasa di seluruh Indonesia yang dikoordinatori oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan sebagai pengampu kegiatan Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra. Berikut ini rekapitulasi capaian sesuai dengan Perjanjian Kinerja Badan Bahasa.



Jumlah Bahasa Terkembangkan	Target	Capaian	%	Keterangan
Jumlah Kosakata Indonesia	2.000	2.000	100,00%	Pusbang
Jumlah Kosakata Indonesia	57.912	53.980	93,21%	UPT
<b>Total</b>	<b>59.912</b>	<b>55.980</b>	<b>93,44%</b>	<b>Badan Bahasa</b>

Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi sehingga target indikator kinerja belum tercapai antara lain:

1. Sumber daya manusia yang berkualifikasi, terutama dalam bidang leksikografi dan terminologi.
2. Rujukan berupa buku, jurnal, koran, majalah, penelitian, dan sebagainya yang bersifat nasional dan internasional yang cetak dan digital; dan
3. Sumber daya manusia di bidang TIK yang terlatih.

Beberapa langkah antisipasi yang diambil agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. merekrut tenaga teknis yang berkualifikasi dalam bidang linguistik terapan;
2. merekrut tenaga teknis untuk mengelola TIK;
3. inventarisasi kosakata bahasa Indonesia dan daerah yang khas dengan mengoptimalkan sumber daya baik di pusat maupun UPT;
4. melibatkan masyarakat dalam pengembangan dan penambahan kosakata secara urun daya (*crowd sourcing*) melalui surat, pos-el, telepon, faksimili, serta aplikasi daring dan luring;
5. menginventarisasi kosakata baru yang muncul di berbagai media;
6. membangun korpus Indonesia untuk mengetahui perkembangan kosakata bahasa Indonesia;
7. mengodifikasi berbagai istilah dan kosakata khusus dengan melibatkan pakar/praktisi bidang ilmu; dan



8. mengikuti seminar, simposium, dan lokakarya berkaitan dengan peristilahan, perkamusan, dan korpus bahasa agar selalu mengetahui perkembangan mutakhir untuk menjaga kualitas hasil dan pekerjaan pengembangan kosakata bahasa Indonesia.

## **IKP #2 Jumlah Bahasa dan Sastra Terlindungi**

Indonesia memiliki khazanah bahasa daerah yang beragam dan tersebar dari Sabang hingga Merauke. Dalam bahasa daerah itu pun terdapat beragam dialek. Keanekaan bahasa itu merupakan cerminan keanekaragaman etnis dan budaya masyarakat Indonesia. Sejak tahun 1992 hingga pertengahan tahun 2018, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah memetakan 668 bahasa daerah di seluruh Indonesia dan masih banyak bahasa daerah lain yang belum terpetakan. Di antara ratusan bahasa yang terdapat di Indonesia tersebut dari tahun ke tahun jumlahnya terus berkurang, terancam punah, bahkan ada yang sedang menuju kepunahan.

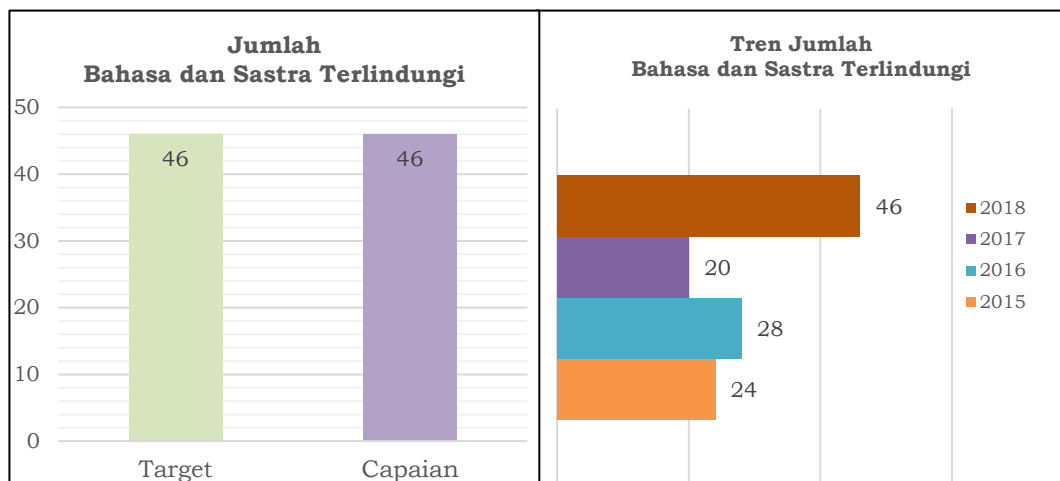
Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Renstra 2019	Capaian Renstra 2019
		Target	Realisasi	%		
<b>Jumlah Bahasa dan Sastra Terlindungi</b>	20	46	46	100	120	118

Upaya pelindungan bahasa sebuah usaha yang hasilnya tidak “nyata” secara materi-ekonomis, tetapi hal ini adalah perjuangan untuk memberikan sumbangan signifikan dalam rangka melindungi dan mengelola kekayaan batin bangsa (sesuatu yg menyangkut jiwa [perasaan hati, dsb]; semangat; hakikat). Kepunahan sebuah bahasa bukan sekadar kepunahan kosakata atau tata bahasa, tetapi kehilangan warisan budaya bangsa yang sangat berharga. Bahkan, *UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2010)* mengingatkan bahwa ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga—sejumlah





besar legenda, puisi, dan pengetahuan yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah.



Pelindungan bahasa dan sastra merupakan salah satu dari tugas dan fungsi dari Badan Bahasa. Selain masyarakat pemilik bahasa dan sastra itu sendiri, pemerintah pun tentu ikut hadir dalam usaha pelindungan ini, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014. Untuk memaksimalkan upaya pelindungan bahasa daerah tersebut, Badan Bahasa sebagai



representasi pemerintah dalam koordinasi pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra—menyediakan prasarana perlindungan bahasa daerah tersebut. Konservasi dan revitalisasi merupakan dua bentuk kegiatan yang dirancang Badan Bahasa sebagai upaya dalam perlindungan bahasa dan sastra. Keduanya saling terkait dan keduanya dapat berjalan berkesinambungan. Berikut tren capaian jumlah bahasa dan sastra terlindungi dan foto salah satu Wawancara dengan penutur bahasa Batuley, dalam rangka pemetaan bahasa.

Capaian indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan. Dari target sebanyak 46 bahasa atau sastra terlindungi pada tahun 2018, kegiatan yang dilakukan terealisasi dengan persentase capaian sebesar 100%. Capaian indikator tersebut dilakukan melalui tiga cara, yaitu pemetaan, pengonservasian, dan perevitalisasian. Berikut ini data bahasa terpetakan, terkonservasi, dan terevitalisasi.

Bahasa Terpetakan			Bahasa Terekonservasi			Bahasa Terevitalisasi		
No	Bahasa	Provinsi	No	Bahasa	Provinsi	No	Bahasa	Provinsi
1	Bahasa Woda-Woda	Maluku	1	Kajian Vitalitas Bahasa Saleman	Maluku	1	Bahasa Nedeabang	Nusa Tenggara Timur
2	Bahasa Batuley	Maluku	2	Kajian Vitalitas Bahasa Adang	Nusa Tenggara Timur	2	Bahasa Budong-Budong	Sulawesi Barat
3	Bahasa Komfane	Maluku	3	Kajian Vitalitas Bahasa Benggaulu	Sulawesi Barat	3	Bahasa Rejang Lebong	Bengkulu
4	Bahasa Makatian	Maluku	4	Penyusunan Sistem Fonologi Bahasa Kalabra	Papua Barat	4	Bahasa Golik	Kalimantan Barat
5	Bahasa Sar	Maluku	5	Penyusunan Sistem Morfologi Bahasa Kalabra	Papua Barat	5	Bahasa Kerinci	Jambi
6	Bahasa Weinami	Papua	6	Penyusunan Sistem Sintaksis Bahasa Kalabra	Papua Barat	6	Sastra Hiem	Aceh
7	Bahasa Taru (Irawa)	Papua	7	Penyusunan Sistem Aksara Bahasa Kalabra	Papua Barat	7	Sastra Kayat	Riau
8	Bahasa Rarankwa	Papua	8	Penyusunan Sistem Fonologi Bahasa Nedeabang	Papua Barat	8	Sastra Goet	Nusa Tenggara Barat
9	Bahasa Mandobo Tengah	Papua	9	Penyusunan Sistem Morfologi Bahasa Nedeabang	Papua Barat	9	Sastra Tembang Pagerageungan/Ciawian	Jawa Barat
10	Bahasa Kiwai	Papua	10	Penyusunan Sistem Sintaksis Bahasa Nedeabang	Nusa Tenggara Timur	10	Sastra Dolabololo	Maluku Utara
11	Bahasa Kenyam Niknene	Papua	11	Penyusunan Sistem Aksara Bahasa Kalabra	Papua Barat	<b>10 Bahasa Terevitalisasi</b>		
12	Bahasa Deranto	Papua	12	Konservasi Manuskrip	Jawa Barat			
13	Bahasa Asmat Darat Weijens	Papua	13	Konservasi Manuskrip	Sumatra Utara			
14	Bahasa Diae	Papua	14	Konservasi Manuskrip	Sulawesi Selatan			





Bahasa Terpetakan			Bahasa Terkonservasi		Bahasa Terevitalisasi
15	Bahasa Kapayap (Soko Benna)	Papua	15	Konservasi Sastra Lisan	Maluku Utara
16	Bahasa Sough Bohon	Papua Barat	16	Konservasi Sastra Lisan	Jawa Barat
<b>Total 16 Bahasa Terpetakan</b>			17	Konservasi Sastra Lisan	Sumatra Utara
			18	Kajian Vitalitas Sastra Dolo-Dolo	Nusa Tenggara Timur
			19	Kajian Vitalitas Sastra wayang Krucil	Jawa Timur
			20	Kajian Vitalitas Sastra Basengan	Kalimantan Barat
			<b>20 Bahasa Terkonservasi</b>		

Adapun hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya target indikator kinerja jumlah bahasa dan sastra terlindungi antara lain:

- pembuatan instrumen, juklak, dan juknis yang sedikit terhambat;
- koordinasi dengan tim pelaksana daerah yang terkadang kurang sesuai serta kondisi alam yang terkadang kurang memungkinkan pada saat pelaksanaan kegiatan;
- jumlah maestro/penutur asli yang sangat terbatas dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang terbatas; dan
- kondisi cuaca dan alam di wilayah timur yang sulit sehingga membutuhkan waktu penelitian yang lama dan alat transportasi khusus.

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut diatas langkah antisipasi yang diambil adalah sebagai berikut:

- Menyegerakan penyusunan instrumen, juklak dan juknis;
- Penyesuaian jadwal dan mengkoordinasikan kegiatan sedini mungkin;
- Menggunakan jasa penerjemah lokal dan menambahkan pendamping lapangan dalam tim pengambilan data; dan



- d. Menambahkan waktu pengambilan data lapangan untuk mengatasi kesulitan medan yang memakan waktu tempuh yang lebih lama.

### **IKP #3 Jumlah Bahan Penelitian Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra**

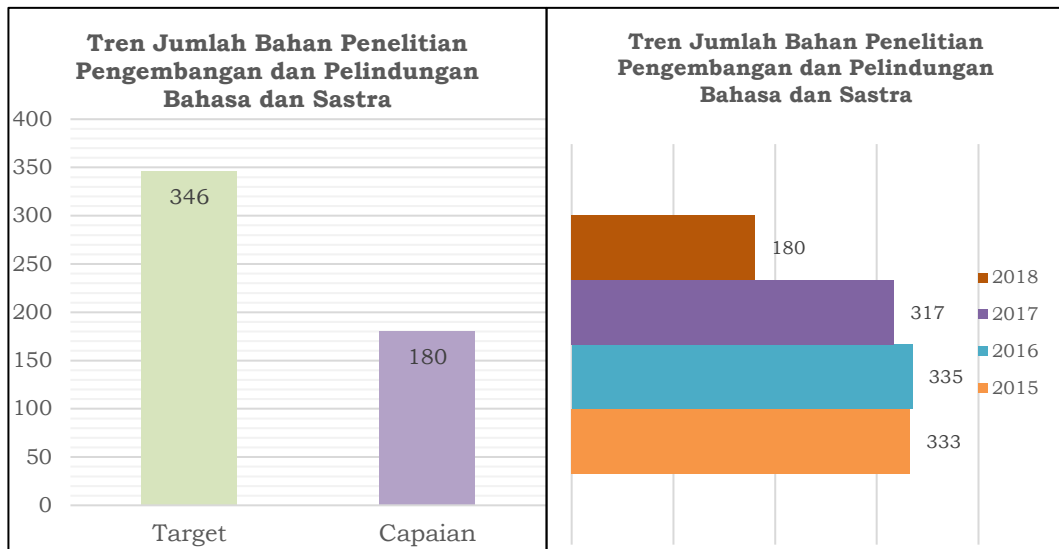
Pada tahun 2018, penelitian/pengkajian terdiri atas beberapa tema, yaitu (1) Kelayakan Karya Sastra sebagai Bahan Bacaan Siswa; (2) Kebangsaan dalam Manuskrip Nusantara dan Tradisi Lisan; (3) Embrio Nasionalisme dalam Sastra Indonesia Periode Awal; (4) Penguasaan Kosakata Bahasa Indonesia oleh Siswa; dan (5) Sikap Bahasa Generasi Muda”. Capaian indikator kinerja ini belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari target sebanyak 346 naskah penelitian bahasa dan sastra terealisasi dengan persentase capaian sebesar 52,02%. Jumlah target dan capaian naskah penelitian merupakan akumulasi penelitian yang dilakukan di seluruh Indonesia.

Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Renstra 2019	Capaian Renstra 2019
		Target	Realisasi	%		
<b>Jumlah Bahan Penelitian Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra</b>	878	346	180	52,02%	1.722	838

Setiap kajian/penelitian yang akan dilakukan harus memenuhi beberapa langkah kerja, yaitu

- a. penyusunan desain,
- b. penyusunan instrumen,
- c. pengambilan data lapangan,
- d. analisis data,
- e. penyusunan laporan, dan
- f. seminar hasil.





Aktivitas dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan dalam renstra dilakukan oleh 32 satker di Badan Bahasa, yaitu Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, serta seluruh Balai/Kantor Bahasa. Perlu kami sampaikan bahwa target antara Renstra dan Perjanjian Kinerja berbeda: dalam Renstra target sebesar 346 naskah setiap tahunnya, sedangkan dalam PK hanya sebesar 186 naskah. Berikut ini aktivitas rekapitulasi capaian yang dilaksanakan oleh Badan Bahasa.



<b>Jumlah Bahan Penelitian Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Jumlah Penelitian Bahasa dan Sastra</b>	29	29	100,00%	<b>Pusbang</b>
<b>Jumlah Kajian Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan</b>	6	-	0,00%	<b>PPSDK</b>
<b>Jumlah Penelitian Bahasa dan Sastra</b>	151	151	100%	<b>UPT</b>
<b>Total</b>	<b>186</b>	<b>180</b>	<b>96,77%</b>	<b>Badan Bahasa</b>

Adapun hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya target indikator kinerja jumlah bahan penelitian pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra antara lain:

- tahapan pelaksanaan penelitian tidak serempak;
- tenggat waktu penerbitan hasil penelitian (dalam hal ini bekerja sama dengan LIPI Press) tidak pasti, naskah dikirim terlambat, idealnya awal atau pertengahan tahun; dan
- pelaksanaan lokakarya hasil penelitian, seminar nasional bahasa dan sastra, dan pelatihan penelitian tidak sesuai jadwal.

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut langkah antisipasi yang perlu diambil adalah sebagai berikut:

- diadakan pertemuan dengan beberapa Kabid yang menghasilkan beberapa kesepakatan tentang pelibatan peneliti dalam kegiatan lain;
- koordinator peneliti mengontrol perjalanan naskah dan anggaran kepada PPK; dan
- dianggarkan setiap tahun dalam RAKKL.

#### **Sasaran #4 Meningkatnya Pengendalian Bahasa Indonesia di Ruang Publik**

Indikator kinerja:

- Jumlah Badan Publik dan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya



Pencapaian SS “Meningkatnya Pengendalian Bahasa Indonesia di Ruang Publik” ini dilakukan dengan melihat pada meningkatnya jumlah ruang publik yang terkendali. Keterkendalian tersebut tidak luput dari peran serta pemerintah daerah dalam dukungan terhadap Gerakan Pengutamaan Bahasa Negara, baik dalam bidang regulasi yang diterapkan, maupun dalam pembinaan terhadap pengguna bahasa di wilayahnya.

Ketercapaian indikator kinerja tersebut merupakan upaya Badan Bahasa dalam meningkatkan jumlah ruang publik yang terkendali. Untuk itu, strategi yang dilakukan antara lain:

1. melakukan verifikasi dan sosialisasi pengutamaan penggunaan bahasa negara pada ruang publik di daerah; dan
2. pengolahan dan validasi data keterkendalian wilayah penggunaan bahasa pada ruang publik.

### **IKP #1 Jumlah Badan Publik dan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya**

Indikator “Jumlah Badan Publik dan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya” dicapai dengan melakukan berbagai aktivitas. Pelaksanaan aktivitas terkait dengan pencapaian IKP tersebut dilakukan di seluruh Indonesia. Target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2.657 lembaga pada tahun 2018 tidak tercapai, hanya mencapai 2.653 lembaga atau sekitar 99,8% dari target yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Tahun 2018		Target Renstra 2019	Capaian Renstra 2019
		Target	Realisasi %		
<b>Jumlah Badan Publik dan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya</b>	1.814	2.657	2.653 99,8%	1.130	4.467



Meskipun tidak tercapai target pada IKP “Jumlah Badan Publik dan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasa”, secara akumulasi capaian target telah terpenuhi melebihi target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Bahasa, yaitu 904 lembaga pada tahun 2018. Target pada Perjanjian Kinerja dan pada Renstra memang tidak sama, pada PK sebesar 2.657 lembaga dan pada Renstra sebesar 904 lembaga. Perbedaan jumlah target tersebut karena Badan Bahasa memfokuskan “Badan Publik dan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasa” agar memberikan dampak yang baik pada keterkendalian pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik.



Upaya yang dilakukan agar indikator kinerja tersebut tercapai dilakukan dengan melaksanakan beberapa aktivitas, antara lain sebagai berikut:

- 1) Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik;
- 2) Sosialisasi dan Verifikasi Pengutamaan Penggunaan Bahasa Negara di Ruang Publik;
- 3) Sosialisasi dan Verifikasi Pengutamaan Bahasa Negara;
- 4) Provinsi Nomine Peraih Penghargaan Adibahasa Tahun 2018;



- 5) Bimbingan Teknis Penyegaran Keterampilan Berbahasa bagi Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha;
- 6) Bimbingan Teknis Penyegaran Keterampilan Berbahasa bagi Aparatur Pemerintah dan Pemangku Kepentingan di DKI Jakarta;
- 7) Fasilitasi Layanan Bantuan Teknis Kebahasaan dan Kesastraan pada Lembaga/Instansi;
- 8) Fasilitasi Layanan Bantuan Teknis Tenaga Ahli Bahasa dan Saksi Ahli Bahasa pada Lembaga/Instansi;
- 9) Audiensi Pengutamaan Bahasa Negara dengan Pemangku Kepentingan (Lembaga/Badan Publik);
- 10) Bimbingan Teknis Penyegaran Keterampilan Berbahasa bagi Insan Media Massa;
- 11) Safari Bahasa Media Massa; dan
- 12) Lokakarya Penggunaan Bahasa Indonesia di Media Massa.

Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan yang berbeda dengan yang sudah direncanakan pada awal tahun. Beberapa langkah antisipasi yang diambil dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta memperkuat regulasi dalam pelaksanaan kegiatan.

- 1) wilayah kabupaten/kota berjauhan;
- 2) terdapat perbedaan data yang diambil oleh Tim Pemantauan Daerah dari juknis;
- 3) data pemantauan masih menggunakan juknis pemantauan media luar ruang, sehingga tidak sesuai dengan instrumen penilaian di Tahun 2018;
- 4) tidak dilaksanakan sosialisasi dari perubahan juknis terbaru di Tahun 2018 untuk Tim Pemantauan Daerah.



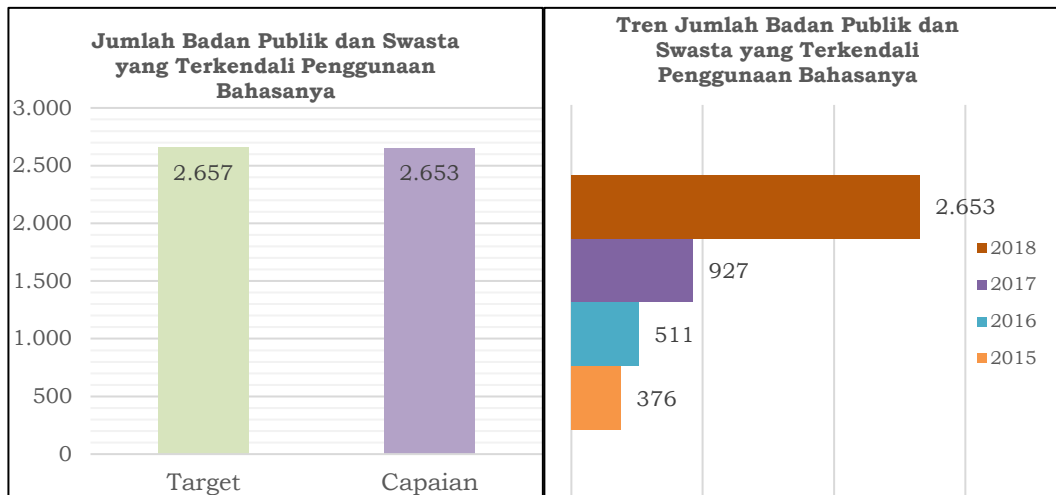
- 5) penyusunan portal peta keterkendalian wilayah penggunaan bahasa untuk memudahkan Tim Pemantauan Daerah dalam memutakhirkan data pemantauan di wilayah dan portal tersebut bisa diakses oleh publik;
- 6) informasi perubahan juknis dan kebijakan teknis seharusnya disampaikan sebelum tahun anggaran baru, tetapi dalam praktiknya dilaksanakan pada bulan Februari dan masih memungkinkan untuk balai dan kantor merevisi anggaran sesuai dengan juknis terbaru; dan
- 7) perubahan juknis disertai dengan sosialisasi atau bimbingan teknis melalui kegiatan Pengolahan dan Validasi Data Keterkendalian Wilayah Penggunaan Bahasa.

Berikut ini tren capaian indikator “Jumlah Badan Publik dan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya” beserta rekapitulasi capaian yang diperoleh dari Pusat Pembinaan dan Balai/Kantor Bahasa.

<b>Jumlah Badan Publik dan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Jumlah Badan Publik yang Terkendali Penggunaan Bahasanya</b>	300	300	100,00%	<b>Pusbin</b>
<b>Jumlah Badan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya</b>	75	76	101,33%	<b>Pusbin</b>
<b>Jumlah Badan Publik yang Terkendali Penggunaan Bahasanya</b>	1.803	1.798	99,72%	<b>UPT</b>
<b>Jumlah Badan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya</b>	479	479	100,00%	<b>UPT</b>
<b>Total</b>	<b>2.657</b>	<b>2.653</b>	<b>99,85%</b>	<b>Badan Bahasa</b>







### **Sasaran #5 Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia melalui Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan di Tingkat ASEAN**

Indikator kinerja:

1. Jumlah Bahan Pengembangan Strategi Kebahasaan
2. Jumlah Akses Diplomasi Kebahasaan

Jumlah pengguna di seluruh dunia, Bahasa Indonesia berada di urutan kelima. Tentu di bawah Bahasa Tiongkok dan Inggris yang termahsyur itu. Melihat kenyataan itu, Badan Bahasa memiliki cita-cita menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional



yang penggunaannya tidak hanya di ASEAN tetapi juga di PBB. Untuk menggapai cita-cita tersebut, Badan Bahasa melalui Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK) yang mempunyai cakupan kerja yaitu penyebaran bahasa negara ke luar negeri, peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dan peningkatan kompetensi berbahasa asing strategis. Harapan dengan cakupan kerja Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK) tersebut, bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.

Dalam upaya penginternasionalan bahasa Indonesia di kawasan ASEAN, Badan Bahasa mempunyai target kinerja yang tertuang pada sasaran strategis “Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia melalui Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan di Tingkat ASEAN”. SS tersebut didukung oleh satu indikator kinerja sebagai alat ukur tingkat keberhasilan dalam pencapaian target kinerja.

Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Renstra 2019	Capaian Renstra 2019
		Target	Realisasi	%		
1. Jumlah Bahan Pengembangan Strategi Kebahasaan	28	56	56	100%	30	84
2. Jumlah Akses Diplomasi Kebahasaan	20.566	420	1.960	466,6%	16.500	28.940

### **IKP #1 Jumlah Bahan Pengembangan Strategi Kebahasaan**

Capaian pada salah satu indikator “Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia melalui Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan di Tingkat ASEAN” dapat dilihat pada tabel berikut.

Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Renstra 2019	Capaian Renstra 2019
		Target	Realisasi	%		
Jumlah Bahan Pengembangan Strategi Kebahasaan	18	5	6	85,71%	30	24

Untuk mencapai target “Jumlah Bahan Pengembangan Strategi” ini menargetkan lima naskah. Dari target lima naskah, sebanyak enam



naskah dapat disusun dan diselesaikan. Enam naskah yang dihasilkan di tahun 2018, yaitu:

1. Pedoman Bengkel Penerjemahan Tulis dan Lisan, yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Bengkel Penerjemahan Tulis dan Penerjemahan Lisan.
2. Pedoman Bimbingan Teknis Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), yang digunakan sebagai standar bagi penyelenggara bimbingan teknis pengajaran BIPA di dalam dan di luar negeri (Balai dan Kantor bahasa, perguruan tinggi, pegiat, afiliasi BIPA).
3. Pedoman Pengelolaan Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Sastra. Pedoman ini digunakan sebagai petunjuk, arahan dan kemudahan dalam pengembangan dan pengelolaan Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Sastra.
4. Pedoman Pengembangan Bahan Ajar dan Bahan Pendukung BIPA, digunakan sebagai dasar acuan bersama dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sehingga memiliki arah yang selaras dalam mengembangkan bahan ajar/bahan pendukung BIPA yang sesuai karakteristik pemelajar asing sasaran. Selain itu, pedoman ini digunakan sebagai panduan teknis dalam memberikan keseragaman struktur, format, materi (tema) dan persamaan persepsi, serta sasaran bahan ajar/bahan pendukung BIPA yang sesuai dengan kebutuhan pemelajar asing sasaran. Serta digunakan sebagai panduan koordinatif dalam mewujudkan bahan ajar/bahan pendukung BIPA yang bersumber pada kearifan lokal dan nilai-nilai adiluhung Indonesia sekaligus pendukung ketersediaan bahan pendamping literasi yang sesuai dengan budaya, konteks, dan karakteristik Indonesia

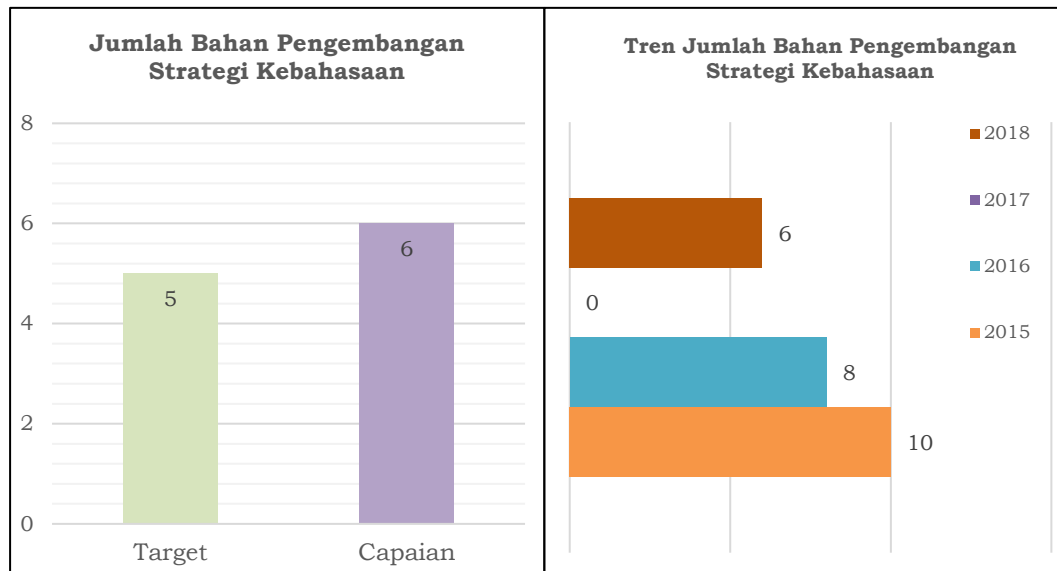


5. Pedoman Teknis Penguatan Jejaring Kemitraan Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), digunakan sebagai petunjuk penyelenggaraan kegiatan ke-BIPA-an dalam rangka penguatan jejaring kemitraan, sebagai acuan dan model kegiatan penguatan jejaring kemitraan program BIPA, serta pembagian tata kelola kegiatan.
6. Pedoman Studi Literasi Membaca, digunakan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan studi literasi membaca bagi siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia yang dapat dilakukan oleh peneliti dalam lingkup Badan Bahasa, akademisi, maupun guru dalam berbagai jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Dilihat secara akumulasi, pada tahun 2018 naskah yang tersusun ditargetkan sebanyak 28 naskah, namun yang dapat disusun dan diselesaikan masih sebanyak 24 naskah (85,71%). Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2017 penyusunan naskah bahan pengembangan strategi tidak dianggarkan/tidak dilaksanakan, namun dilakukan reviu secara mandiri terhadap naskah yang telah disusun pada tahun-tahun sebelumnya.

Pada Renstra tercantum target “Jumlah Bahan Pengembangan Strategi” sampai dengan tahun 2019 sebanyak 30 naskah. Dari target 30 naskah tersebut, sampai dengan tahun 2018 sebanyak 24 naskah yang dapat disusun dan diselesaikan. Sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 6 naskah. Kekurangan sebanyak 6 naskah tersebut akan diselesaikan melalui penyusunan naskah di tahun 2019. Berikut ini Tren Jumlah Bahan Pengembangan Strategi Kebahasaan.





Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi tahun 2018 lebih banyak karena pada tahun 2017 PPSDK tidak melaksanakan dan tidak menganggarkan Penyusunan Pedoman, namun melakukan reviu atas naskah pedoman yang telah disusun tahun 2015 – 2016. Sehingga sisa target di tahun 2016 dan 2017 diakumulasikan ke tahun berikutnya.

Faktor Pendukung tersusunnya 6 naskah bahan pengembangan strategi pada tahun 2018, dikarenakan adanya dukungan dari kegiatan sebagai berikut.

- Persiapan awal penyusunan naskah diikuti oleh 6 tim penyusun naskah dan mengikutsertakan narasumber utama sebagai penyusun naskah.
- Pengumpulan data dukung oleh tim penyusun untuk melengkapi bahan penyusunan yang diperlukan. Data dukung tersebut sebagai bahan penyusunan yang dilakukan oleh narasumber utama.
- Pengolahan data-data yang dilakukan oleh anggota tim penyusunan naskah selama dua bulan.



- d. Penyusunan naskah oleh narasumber utama dibantu oleh anggota tim penyusun.
- e. Pembahasan dan telaah naskah secara bersama-sama, narasumber utama penyusun, dan pimpinan Badan Bahasa, untuk selanjutnya dilakukan finalisasi naskah.

Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi sehingga target “IKP Bahan Pengembangan Strategi” di tahun 2018 belum tercapai yaitu tidak dilaksanakannya/tidak dianggarkannya penyusunan pedoman di tahun 2017 karena dilakukan reviu atas naskah pedoman yang telah disusun di tahun 2015—2016.

Upaya yang dilakukan untuk memperoleh capaian 2019 yaitu melaksanakan penyusunan 6 naskah untuk menyelesaikan sisa target. Target tahun 2015—2019 sebanyak 30 naskah.

## IKP #2 Jumlah Akses Diplomasi Kebahasaan

Capaian pada salah satu indikator “Jumlah Akses Diplomasi Kebahasaan” dapat dilihat pada tabel berikut.

Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Tahun 2018		Target Renstra 2019	Capaian Renstra 2019
		Target	Realisasi		
Jumlah Akses Diplomasi Kebahasaan	26.980	420	1.960	466,6%	16.500
					28.940

Pada 2018, IKP “Jumlah Akses Diplomasi Kebahasaan” memiliki target sebanyak 420 orang. Dari target tersebut, capaian di tahun 2018 diperoleh melalui aktivitas pemelajar bahasa asing strategis memiliki target sebanyak 200 orang pemelajar dan aktivitas penugasan pengajar BIPA ke luar negeri sebanyak 226 orang pengajar. Pemelajar asing strategis yang mengikuti aktivitas ini merupakan pasukan TNI yang dipersiapkan akan dikirim untuk misi perdamaian. Berikut ini data aktivitasnya.



Gel.	Tanggal Pelaksanaan	Asal Peserta	Tempat Pelaksanaan	Materi	Jumlah Peserta
I	31 Januari - 28 Februari 2018	Personel <i>Standby Military Observers</i> (Milobs) dan <i>Military Staff</i> (Milstaff) TNI	PMPP TNI	Bahasa Arab dan Perancis	80
II	28 Maret - 16 April 2018	Personel Satgas Kompi Zeni TNI Kontingen Garuda XXXVII-E MINUSCA CAR	PPSDK dan PMPP TNI	Bahasa Perancis dan Inggris	200
III	26 April - 2 Mei 2018	Personel Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI serta Personel Misi	PPSDK	Bahasa Inggris	30
IV	3 - 18 Juli 2018	Personel enam Satgas TNI Kontingen Garuda UNIFIL	PPSDK dan PMPP TNI	Bahasa Arab dan Inggris	310
V	14 - 29 Agustus 2018	Personel Satgas Batalyon Mekanis TNI Kontingen Garuda XXIII-M UNIFIL	PPSDK dan PMPP TNI	Bahasa Arab dan Inggris	850
VI	17 - 21 September 2018	Guru SMP Negeri Kabupaten Bogor	PPSDK	Bahasa Perancis dan Inggris	30
VII	21 September - 5 Oktober 2018	Personel Satgas Kompi Zeni TNI Kontingen Garuda XX-P Monusco Kongo	PPSDK	Bahasa Perancis dan Inggris	175
VIII	21 - 23 November 2018	Guru SMP Swasta Kabupaten Bogor	PPSDK	Bahasa Inggris	30
IX	5 - 11 Desember 2018	Personel Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI	PPSDK	Bahasa Arab dan Inggris	29
<b>TOTAL</b>					<b>1.734</b>

Pengajar BIPA tahun 2018 yang bertugas tahun 2018 sebanyak 226 penugasan yang tersebar di 22 negara. Dari 226 penugasan tersebut, 128 penugasan diantaranya merupakan pengajar BIPA yang dikirimkan dari PPSDK, dan 98 penugasan merupakan pengajar BIPA lokal. Pengajar lokal yang ditugaskan merupakan warganegara Indonesia yang sedang bekerja atau sedang menempuh pendidikan di luar negeri, serta warganegara asing yang memiliki kemampuan Bahasa Indonesia dengan baik dan memiliki kompetensi sebagai pengajar BIPA. Berikut ini data aktivitasnya.

Negara	Kawasan	Jumlah Pengajar BIPA			
		2015	2016	2017	2018
Thailand	ASEAN	1	29	47	18
Timor Leste	ASEAN		8	34	61
Singapura	ASEAN	1	1	1	
Vietnam	ASEAN	2	2	2	3
Kamboja	ASEAN		4	7	9
Myanmar	ASEAN		4		
Malaysia	ASEAN			2	3
Laos	ASEAN		2	2	3
Filipina	ASEAN		4	6	16
Papua Nugini	ASPASAF		2	20	18
Australia	ASPASAF	3	2	12	7
Jepang	ASPASAF	2		1	
Tiongkok	ASPASAF	1	2	0	
India	ASPASAF			2	3
Tunisia	ASPASAF		2	5	2



Negara	Kawasan	Jumlah Pengajar BIPA			
		2015	2016	2017	2018
<b>Mesir</b>	ASPASAF	3	4	38	46
<b>Uzbekistan</b>	AMEROP			2	7
<b>Rusia</b>	AMEROP			3	5
<b>Finlandia</b>	AMEROP			1	1
<b>Prancis</b>	AMEROP	1	2	5	9
<b>Italia</b>	AMEROP		1	2	1
<b>Inggris</b>	AMEROP			4	4
<b>Bulgaria</b>	AMEROP				2
<b>Austria</b>	AMEROP				3
<b>Jerman</b>	AMEROP		2	1	3
<b>Amerika Serikat</b>	AMEROP		3	3	
<b>Suriname</b>	AMEROP		2	60	2
<b>TOTAL</b>		14	74	200	226

Capaian “Jumlah Akses Diplomasi Kebahasaan” dapat terlaksana dengan baik. Berikut ini beberapa faktor pendukung tercapainya IKP tersebut.

1. Terjalannya kerjasama yang baik antara Badan Bahasa dengan instansi lainnya di lingkungan IPSC (*Indonesia Peace and Security Center*).
2. Tersedianya sarana penunjang kegiatan peningkatan kompetensi bahasa asing strategis berupa beberapa laboratorium bahasa, dan ruang kelas bahasa.
3. Banyak calon pengajar BIPA yang berasal dari masyarakat.
4. Banyak permintaan dari lembaga penyelenggara BIPA di luar negeri.
5. Bimbingan Teknis Pengajaran BIPA (TOT) di Luar Negeri, yang dilaksanakan oleh PPSDK ke beberapa lembaga penyelenggara BIPA di luar negeri (Filipina, Timor Leste, Jerman, dan Arab Saudi).
6. Penguatan koordinasi lembaga terkait BIPA.
7. Fasilitasi Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Siswa Thailand, diselenggarakan oleh PPSDK sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan Bahasa Indonesia bagi siswa Thailand, sebelum mereka kembali ke negaranya untuk menyebarluaskan penggunaan Bahasa Indonesia di Thailand.





Secara umum, kendala dalam pencapaian “Jumlah Akses Diplomasi Kebahasaan” pada tahun 2018, yaitu:

1. kemampuan instruktur dari PPSDK belum memadai dan perlu terus ditingkatkan, baik dari segi penguasaan materi, metode dan teknik pembelajaran.
2. proses pengurusan administrasi perizinan dan VISA untuk pengajar BIPA membutuhkan waktu karena banyaknya kelengkapan berkas yang harus diverifikasi, dan melibatkan instansi lain (Biro PKLN, Kemenlu, Setneg), sehingga membutuhkan persiapan, komunikasi dan koordinasi yang baik dan berkala;
3. jadwal pembelajaran BIPA yang diajukan oleh lembaga penyelenggara BIPA di luar negeri yang berbeda dengan kalender akademik di Indonesia, dan permintaan penugasan dari lembaga penyelenggara BIPA di luar negeri yang lintas tahun sehingga belum dapat diakomodir dalam sistem anggaran di Indonesia.

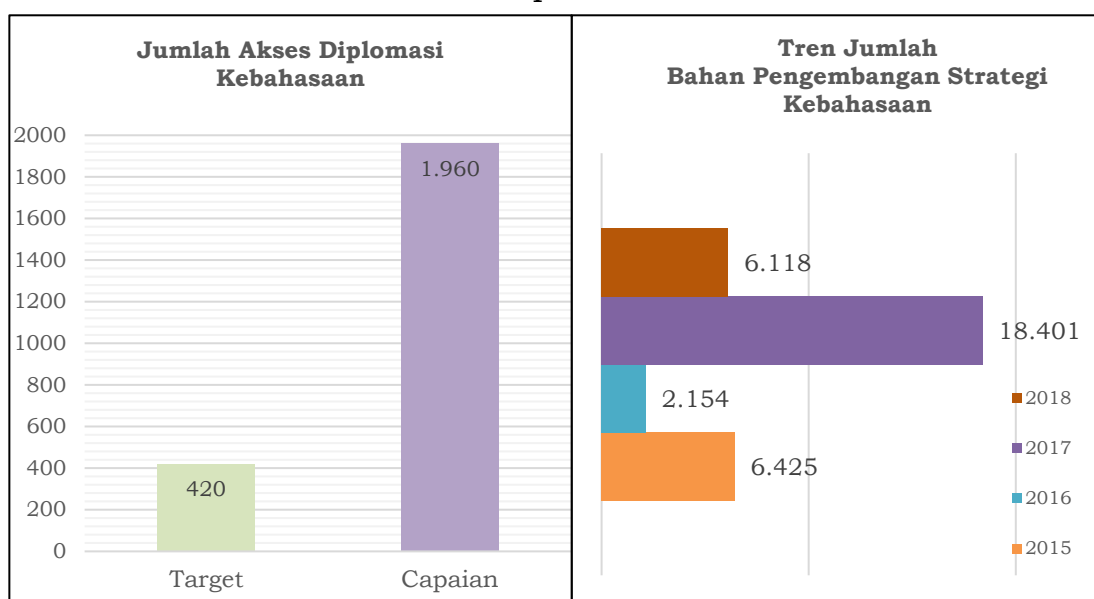
Langkah strategi untuk mengatasi hambatan dilakukan dengan:

1. melaksanakan TOT BIPA, evaluasi dan konsinyasi terkait penugasan pengajar BIPA di luar negeri;
2. beromunikasi dan berkordinasi secara berkala dengan instansi yang terlibat dalam pengiriman pengajar BIPA ke luar negeri (Biro PKLN, Kemenlu, Setneg), agar pengurusan visa perijinan dan persyaratan administrasi lainnya dapat dipercepat prosesnya;m
3. emberikan informasi kepada lembaga penyelenggara BIPA di luar negeri untuk menyesuaikan jadwal pembelajaran BIPA agar diselenggarakan di tahun anggaran berjalan.



4. melaksanakan pemetaan ke negara tujuan pengiriman pengajar BIPA berdasarkan surat permintaan dari lembaga penyelenggara BIPA di luar negeri yang masuk ke PPSDK, untuk memperoleh informasi prospek pembelajaran BIPA dalam jangka panjang di negara tersebut, jumlah calon peserta pembelajaran BIPA, jadwal pembelajaran BIPA, dukungan dan fasilitas yang tersedia bagi pengajar BIPA, serta manfaat timbal balik pengiriman pengajar BIPA ke negara tersebut bagi Indonesia.

Berikut ini tren Jumlah Akses Diplomasi Kebahasaan.



#### **Sasaran #6 Menguatnya Tata Kelola dan Sistem Pengendalian Manajemen Layanan Tata Kelola Penanganan Kebahasaan**

Indikator kinerja:

1. Nilai LAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

#### **IKP #1 Nilai SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

Capaian pada salah satu indikator “Nilai SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa” dapat dilihat pada tabel berikut.



Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Renstra 2019	Capaian Renstra 2019
		Target	Realisasi	%		
Nilai SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	80,99	75	81,94	109,3%	80	81,94

Dalam mewujudkan target tersebut, ada tiga indikator kinerja yang akan mengukur berhasil atau tidak berhasiltarget tersebut. Sebagai rincian target sasaran yang akan dicapai, berikut ini langkah yang diambil oleh Badan Bahasa dalam meningkatkan nilai SAKIP.

### **1. LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I.**

Adapun aktivitas-aktivitas dalam mendukung indikator/*output* kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, yaitu sebagai berikut.

#### **A. Layanan Perencanaan dan Penganggaran yang Efektif, Cepat, dan Tepat**

Perencanaan adalah sejumlah aktivitas kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk merealisasikan rencana tersebut, dibutuhkan dukungan keuangan/anggaran agar suatu rencana kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Penganggaran mempunyai peranan penting di dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Komponen kegiatan yang dilaksanakan pada layanan perencanaan dan penganggaran Badan Bahasa tahun 2018 adalah sebagai berikut.

- 1) Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Komponen kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran pada tahun 2018 menghasilkan keluaran lima dokumen kinerja dari beberapa aktivitas yang dilaksanakan. Kelima dokumen kinerja tersebut adalah: a. Draf Teknokratik Tahun 2020—2025; b. Bahan Kebijakan Kebahasaan dan



Kesastraan; c. Pagu Indikatif 2019; d. Pagu Definitif 2019; dan e. Pengembangan Aplikasi DAPROVA (data program dan evaluasi).

- 2) Pemantauan Pelaksanaan Program dan Anggaran Komponen kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Program dan Anggaran pada tahun 2018 menghasilkan keluaran dua dokumen kinerja dari beberapa aktivitas yang dilaksanakan, ketiga dokumen kinerja tersebut adalah: a. Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran; b. Laporan Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2018;
- 3) Sinkronisasi Rencana Program dan Anggaran Komponen kegiatan Sinkronisasi Rencana Program dan Anggaran adalah komponen kegiatan yang mendukung pelaksanaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam pelaksanaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan. Badan Bahasa ikut serta pada rembuk nasional tersebut. Adapun maksud dan tujuan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 adalah: mengevaluasi capaian pelaksanaan program prioritas, mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pusat dan daerah, menyepakati kebijakan operasional 2017, dan merumuskan bahan masukan kebijakan pendidikan tahun 2018, serta meningkatkan kerja sama Kemendikbud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota dengan publik/masyarakat komunitas pendidikan dan kebudayaan.

Rekomendasi hasil pelaksanaan Rembuk Nasional yang harus ditindaklanjuti oleh Badan Bahasa adalah Pemerintah



Pusat dan Pemerintah Daerah perlu menjamin kemudahan jangkauan dalam layanan pendidikan dan kebudayaan bagi masyarakat di daerah pinggiran melalui penyediaan jaringan teknologi komunikasi dan transportasi untuk memperkuat literasi dasar, peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia, pemetaan dan pelestarian budaya benda dan tak benda, revitalisasi bahasa daerah, serta pemetaan arkeologi daerah pinggiran untuk kebinekaan dalam kerangka memajukan pendidikan dan kebudayaan.

Dalam menyelenggarakan layanan perencanaan dan penganggaran, Badan Bahasa menemui permasalahan, yaitu sebagai berikut. 1. Sinkronisasi program dan kegiatan satker pusat dan daerah belum optimal. 2. Ketidakpatuhan satuan kerja dalam menaati peraturan perundang-undangan tentang perencanaan dan penganggaran. Adapun tindak lanjut atau solusi agar permasalahan atau kendala dapat diatasi diantaranya: 1. Badan Bahasa terus melakukan upaya sinkronisasi program atau kegiatan satker pusat dan daerah dengan cara membuat peta kegiatan dan *cascading* kegiatan, dan peningkatan koordinasi; 2. Penerapan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan dan penganggaran yang taat asas kepada satuan kerja; dan 3. Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan secara periodik dilakukan oleh Badan Bahasa kepada satuan kerja.

## **B. Peningkatan Layanan Hukum, Kepegawaian dan Keuangan**

### **1) Layanan Hukum dan Tata Laksana**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Subbagian Hukum dan Tata Laksana terus berupaya mengawal



pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Reformasi birokrasi bertujuan untuk melakukan perubahan, yaitu perubahan cara berpikir, penataan peraturan perundangundangan, penguatan organisasi, penataan tata laksana, manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas layanan publik. Pada tahun 2018, dalam mendukung tujuan reformasi birokrasi tersebut, dihasilkan empat dokumen konsep rancangan peraturan yang dihasilkan dari tujuh target yang semula akan dicapai. Adapun empat dokumen konsep rancangan peraturan yang sudah disusun, yaitu sebagai berikut.

- 1) Peraturan Presiden tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Peta Jabatan di lingkungan kemendikbud.

Adapun yang menjadipermasalahan terhadap target kinerja yang tidak tercapai, antara lain sebagai berikut.

- 1) Melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan Lembaga Nonstruktural oleh melalui proses pengharmonisasian/ penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan



peraturan, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional oleh perancang peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM dengan melibatkan lembaga lain terkait substansi.

- 2) Perumusan untuk menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur belum tercapai.
- 3) Belum disepakati dalam menetapkan pelaksanaan agenda penyelarasan dengan lembaga lain terkait substansi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, langkah antisipatif yang diambil adalah, sebagai berikut.

- 1) Menyusun jadwal ulang pembahasan dan tepat dalam pelaksanaan.
- 2) Meningkatkan fungsi koordinasi dengan lembaga terkait dalam upaya percepatan pembahasan.

## **2) Layanan Kepegawaian yang Andal dan Profesional**

Sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu instansi. Fungsi pokok manajemen sumber daya manusia adalah memastikan agar organisasi dapat mencapai tujuan strategisnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi perlumemiliki sumber daya manusia yang dapat diandalkan baik kuantitas maupun kualitas.

Pengelolaan aspek manajemen sumber daya manusia dalam sebuah organisasi secara profesional perlu dilaksanakan dengan optimal, sehingga tujuan menjadikan manajemen



kepegawaian yang handal dan profesional dapat terwujud. Untuk mendukung terwujudnya tujuan tersebut, Badan di tahun 2018, melaksanakan dua komponen kegiatan yaitu Layanan Administrasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Pegawai. Pada komponen Layanan Administrasi Kepegawaian, aktivitas yang dilaksanakan yaitu Pengelolaan Seleksi CPNS tahun anggaran 2018, Pengembangan Sistem Informasi dan Peremajaan Data Kepegawaian, Koordinasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti, dan Sosialisasi Peraturan tentang Kepegawaian. Keempat aktivitas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk komponen kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai, aktivitas yang dilaksanakan yaitu Pengiriman Peserta Diklat sebanyak 41 orang dan 36 orang mengikuti Peningkatan Kemampuan Menulis Naskah Dinas. Sebanyak 77 orang pegawai Badan Bahasa di tahun anggaran 2018 telah ditingkatkan kompetensinya. Jumlah 77 orang tersebut masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pegawai Badan Bahasa yang mencapai 1.224 orang.

Padahal, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, diamanatkan setiap pegawai harus ditingkatkan kompetensinya minimal 20 jam/tahun. Adapun yang menjadi permasalahan terhadap kondisi tersebut adalah, sebagai berikut.

- 1) Belum disusun rencana dan pengembangan pegawai.
- 2) Koordinasi Badan Bahasa dengan Biro Sumber Daya Manusia, Kemendikbud terkait pengembangan sumber daya manusia tidak optimal.





Untuk mengatasi permasalahan pengelolaan pegawai tersebut di atas, langkah antisipatif yang dilakukan adalah sebagai berikut.

- 1) Perlu segera disusun rencana induk pengembangan pegawai yang menjadi acuan pengembangan kompetensi pegawai.
- 2) Perlu ditingkatkan koordinasi antara Badan Bahasa dengan Biro Sumber Daya Manusia, Kemendikbud terkait perencanaan dan pengembangan pegawai.

### **3) Layanan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel**

Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Badan Bahasa terus berupaya melakukan perubahan dalam mengelola keuangan negara sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Untuk mendukung hal itu, beberapa komponen kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Bahasa di tahun 2018, yaitu Pengelolaan Perbendaharaan dan Verifikasi, Pengujian, dan Pengesahan Dokumen Keuangan. Dua komponen kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti. Empat dokumen yang dihasilkan



dari target empat dokumen kegiatan tersebut yaitu, sebagai berikut.

- 1) Dokumen Tindaklanjuti Hasil Temuan.
- 2) Laporan Keuangan Semester I.
- 3) Laporan Keuangan Unaudited.

### **C. Layanan Umum yang Baik**

Dalam mewujudkan pencapaian target indikator Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Badan Bahasa berupaya melakukan peningkatan kualitas layanan umum di Lingkungan Badan Bahasa. Peningkatan kualitas layanan umum bertujuan untuk memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada pengguna, baik pegawai di lingkungan Badan Bahasa ataupun masyarakat umum. Tiga aktivitas pokok pada Layanan Umum di Badan Bahasa yaitu pelaksanaan ketatusahaan, layanan kerumahtanggaan, dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Pada tahun 2018, kinerja yang sudah dihasilkan oleh Badan Bahasa untuk meningkatkan Layanan Umum sebagai berikut.

#### **Komponen Kegiatan Layanan Kerumahtanggaan**

- 1) Pengelolaan layanan kerumahtanggaan.
- 2) Layanan poliklinik (selain menyediakan layanan pengobatan, juga melaksanakan pembelian paket obat).
- 3) Penelusuran arsip statis dengan mengirim 28 boks ke Kemendikbud.
- 4) Peningkatan layanan persuratan.
- 5) Peningkatan layanan perpustakaan (pada tahun 2018, jumlah pengunjung perpustakaan berjumlah 61.295 orang, terdiri atas 3.191 orang berkunjung langsung ke perpustakaan Badan Bahasa, dan 58.104 orang secara daring).



### **Komponen Kegiatan Layanan Keprotokolan**

Aktivitas yang dilaksanakan pada komponen kegiatan layanan keprotokolan adalah kegiatan layanan penyediaan konsumsi rapat-rapat dinas, konsumsi layanan tamu, dan penyelenggaraan peringatan Hardiknas serta Korpri, kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik..

### **Komponen Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)**

Pengelolaan Barang Milik Negara adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan, pemindahtanganan sampai dengan pemusnahan dan penghapusan. Seluruh kegiatan tersebut ditatausahakan dengan baik disertai dengan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Tahapan dalam pengelolaan Barang Milik Negara tersebut dilakukan oleh Badan Bahasa untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib dalam mengelola Barang Milik Negara sesuai dengan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi/keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pada tahun 2018, terdapat delapan subkomponen kegiatan yang dilaksanakan pada komponen kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara yaitu Sinkronisasi SIMAK BMN dengan UPT, Pengelolaan dan Inventarisasi aset BMN, Inventarisasi Penghapusan BMN, Sinkronisasi SIMAK BMN Eselon I Triwulan I dan III, Sinkronisasi SIMAK BMN Semester I, Pra Semester II dan Tahunan, Koordinasi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa, Pencetakan/Pengadaan Blanko, Formulir dan Bahan Cetak Lainny, dan Bantuan Pasca Bencana Palu. Semua aktivitas/sub komponen tersebut



dapat dilaksanakan dengan baik oleh Sekretariat Badan dengan keluaran kinerja yang dihasilkan, yaitu Laporan SIMAK BMN Semesteran dan Tahunan, dan Dokumen Penghapusan BMN.

Pada layanan umum, kegiatan layanan perpustakaan merupakan layanan yang langsung dapat dirasakan bukan hanya oleh pegawai di lingkungan Badan Bahasa, tetapi juga oleh masyarakat umum. Badan Bahasa terus berupaya untuk meningkatkan layanan perpustakaan baik dari peningkatan sarana dan prasarana, maupun SDM pengelola perpustakaan itu sendiri.

#### **D. Peningkatan Layanan Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat**

Dalam menjalankan tugas pelayanan kerja sama dan hubungan masyarakat, Badan Bahasa terus berupaya dalam meningkatkan profesional pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kerja sama kebahasaan yang dilaksanakan baik di dalam negeri maupun dilaksanakan dengan lembaga-lembaga kebahasaan di luar negeri. Hal tersebut untuk mewujudkan visi dan misi Badan Bahasa dalam melaksanakan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra. Aktivitas/komponen kegiatan yang dilakukan oleh Badan Badan pada tahun 2018 dalam upaya peningkatan layanan kerja sama dan kehumasan adalah melakukan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi di Lingkungan Badan, Peningkatan Layanan Hubungan Masyarakat (kehumasan), dan Peningkatan Layanan Kerja Sama Kebahasaan. Pada komponen kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi menghasilkan capaian kinerja



sebanyak empat dokumen dari empat dokumen yang ditargetkan. Keempat dokumen tersebut adalah

- 1) Pengembangan Sistem Informasi;
- 2) Pelaksanaan Pameran Kebahasaan dan Kesastraan;
- 3) Pengembangan Media Digital; dan
- 4) Pengelolaan Data dan Informasi.

## **2. LAYANAN INTERNAL (*OVERHEAD*)**

Layanan Internal (*Overhead*) merupakan pelayanan yang diberikan atau disediakan oleh lembaga berupa penyediaan fasilitas kerja kepada karyawan yang dapat membantu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya agar tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Pada tahun 2018, aktivitas pada Layanan Internal (*Overhead*) yaitu Pengadaan Fasilitas Perkantoran. Komponen tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dengan keluaran kinerja, adalah sebagai berikut.

- a. Pengadaan fasilitas perkantoran sebanyak 129 set.
- b. Pengadaan inventaris untuk bantuan Balai Bahasa Sulawesi Tengah.
- c. Pencetakan buku agenda 2000 eksemplar.
- d. Pencetakan buku literasi sebanyak 10.640 eksemplar.
- e. Pengadaan buku perpustakaan sebanyak 315 buku.

## **3. LAYANAN PERKANTORAN**

Dalam rangka layanan operasional perkantoran Badan Bahasa, diperlukan dukungan sumber daya manusia yang profesional dan sarana prasarana yang terpelihara dengan baik. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja seluruh SDM, bukan hanya dari kuantitas namun juga kualitas kerja agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Dua aktivitas yang dilaksanakan pada Layanan Perkantoran dapat

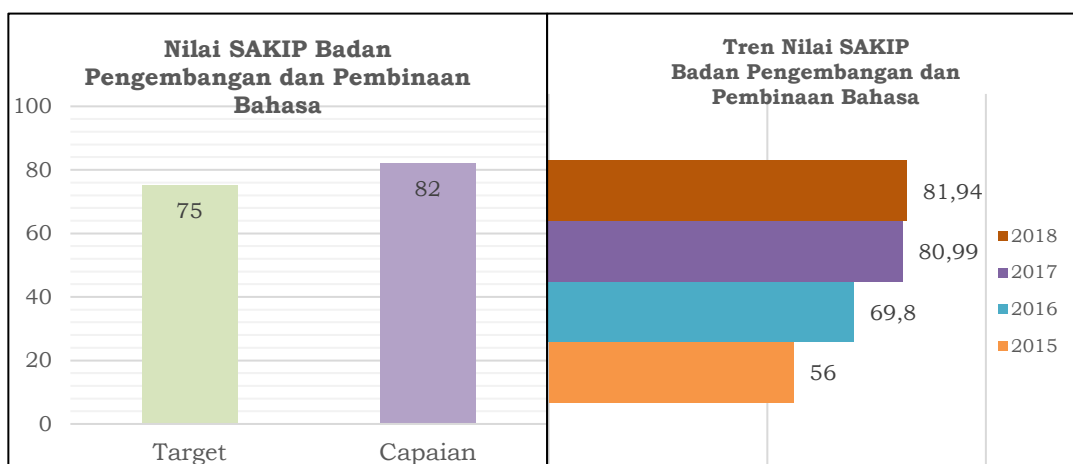


dilaksanakan dengan baik, yaitu Gaji dan Tunjangan dan Operasional Pemeliharaan Perkantoran.

Pembayaran Gaji dan Tunjangan merupakan salah satu bentuk apresiasi bagi ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi. Bentuk perhatian lainnya yang diberikan oleh pemerintah kepada ASN adalah berupa tunjangan uang makan, tunjangan suami/istri, tunjangan anak, dan tunjangan beras untuk mendukung kesejahteraan keluarga pegawai.

Selain itu, untuk menunjang kinerja pemerintah memberikan tunjangan struktural ASN, tunjangan fungsional ASN, tunjangan PPh ASN, belanja tunjangan umum, dan belanja pegawai tunjangan khusus/kegiatan serta belanja pegawai transito. Dengan demikian, diharapkan ASN dapat bekerja optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan organisasi. Komponen kegiatan lainnya yaitu Pemeliharaan dan Operasional.

Berikut ini tren capaian IKP “Nilai SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa”.



Sejak tahun 2015, nilai SAKIP Badan Bahasa terus mengalami peningkatan. Sudah selayaknya Badan Bahasa menerima apresiasi



dari Kemdikbud. Capaian ini merupakan upaya yang terus-menerus dilakukan Badan Bahasa agar Badan Bahasa menjadi salah satu unit utama Kemdikbud yang akuntabel.

## B. REALISASI ANGGARAN

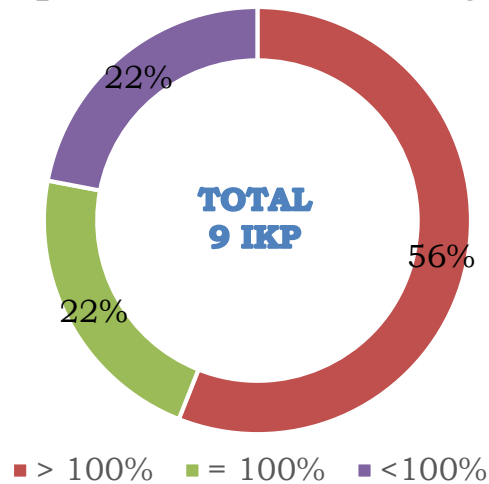
Pagu anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam DIPA tahun 2019 sebesar Rp396.946.190.000,00. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp370.449.633.122,00 dengan persentase daya serap sebesar 93,32%. Pagu sebesar tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian enam sasaran strategis dengan sasaran dengan sembilan indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Anggaran	Realisasi	Daya Serap
1	Meningkatnya Jumlah Judul Buku Pengayaan Literasi Baca	1 Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kesastraan	8.134.518.000	7.378.321.000	90,70%
2	Meningkatnya Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Mengikuti Pengujian UKBI	1 Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Dibina Kemahiran Berbahasa Indonesianya	57.742.353.000	51.818.150.000	89,74%
3	Meningkatnya Bahasa dan Sastra Berkembangkan dan Terlindungi	1 Jumlah Bahasa Berkembangkan	6.400.370.000	6.061.659.000	94,71%
		2 Jumlah Bahasa dan Sastra Terlindungi	6.408.037.000	5.581.989.000	87,11%
		3 Jumlah Bahan Penelitian Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	8.710.266.000	7.868.485.000	90,34%
4	Meningkatnya Pengendalian Bahasa Indonesia di Ruang Publik	1 Jumlah Badan Publik dan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya	14.783.230.000	13.512.196.000	91,40%
5	Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia melalui Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan di Tingkat ASEAN	1 Jumlah Bahan Pengembangan Strategi Kebahasaan	2.443.167.000	1.941.159.000	79,45%
		2 Jumlah Akses Diplomasi Kebahasaan	22.093.712.000	21.687.034.000	98,16%
6	Menguatnya Tata Kelola dan Sistem Pengendalian Manajemen Layanan Tata Kelola Penanganan Kebahasaan	1 Nilai LAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	43.994.484.000	40.894.028.000	92,95%

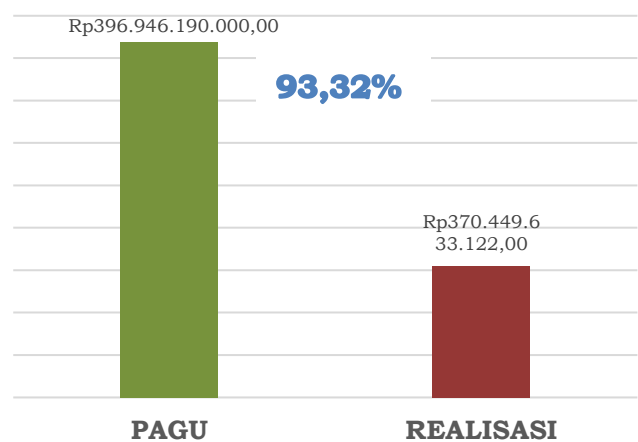


Selama tahun 2018, Badan Bahasa berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

### Capaian Indikator Kinerja



### KINERJA KEUANGAN



Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. penetapan *output* 2019 agar sesuai dengan perubahan Renstra;
2. beberapa indikator yang belum mencapai 100% agar menambah target pada tahun 2019 untuk mengejar capaian renstra. Indikator yang belum tercapai: (1) jumlah bahan penelitian pengembangan dan perlindungan bahasa dan (2) sastra dan jumlah badan publik dan swasta yang terkendali penggunaan bahasanya.
3. distribusi target belum terencana dengan baik.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain:

1. menyesuaikan *output* mengikuti Renstra Revisi;



2. menambah target pada indikator kinerja agar terpenuhi capaian renstra pada tahun 2019 (akhir masa renstra 2015—2019).
3. sinkronisasi antara satker pusat dan daerah perlu dilakukan dengan agar distribusi target dapat terencana dan terlaksana dengan baik sehingga capaian kinerja menjadi baik dan tepat sasaran.